PEMERINTAH KOTA
MATARAM

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD KOTA MATARAM

RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN

TAHUN 2023

RSUD KOTA MATARAM

LEMBAR PENGESAHAN

Mataram, 30 November 2022

Direktur
RSUD Kota Mataram

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,Supsp.F.E.R.,M.Kes.,M.Sc
NIP. 19720403 200212 2 004

Mengetahui :
Ketua Dewan Pengawas

dr. H. Usman Hadi
NIP. 19631121 199603 1 002

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP.19640507 199203 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin baik, cepat, tepat, murah serta didukung peralatan yang modern tidak lagi bisa di tunda. Dapat diambil kesimpulan bahwa minat dan harapan masyarakat untuk berobat pada Rumah Sakit Umum cukup besar, namun mutu kinerja pelayanan di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun swasta masih belum memuaskan, yang di tandai dengan masih banyaknya keluhan pengguna layanan Rumah sakit.

Masyarakat masih di hadapkan pada pilihan yang sulit, antara rumah sakit pemerintah yang lebih murah tetapi kurang profesional, atau rumah sakit swasta yang lebih baik dalam pelayanan namun biaya lebih tinggi. Persaingan yang tidak sehat dari rumah sakit swasta, rendahnya komitmen dan kompetensi SDM, penampilan, budaya kerja dan perilaku yang tidak mendukung telah menciptakan brand image yang buruk bagi rumah sakit pemerintah. Kondisi ini tidak diharapkan terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), secara perlahan terjadi peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram di tandai oleh kenaikan tingkat kunjungan di masing-masing unit layanan. Keadaan tersebut membuat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram mampu bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang ada di Kota Mataram. RSUD Kota Mataram juga meningkatkan pelayanan agar mampu tetap bersaing dengan menjadikan RSUD sebagai pusat pendidikan dan penelitian yang berstandar internasional sehingga drajat kesehatan masyarakat terus meningkat.

B. VISI DAN MISI

VISI : "Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dalam bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian yang berstandar internasional **"**

MISI :

- Memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas dan profesional;
- Melaksanakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas;
- Meningkatkan kompetensi SDM yang berdaya saing;
- Meningkatkan kesejahteraan karyawan/karyawati;
- Meningkatkan sarana prasarana sesuai standar RS Pendidikan dan kemajuan IPTEKDOK.

.

C. MAKSUD DAN TUJUAN RUMAH SAKIT

Pada garis besarnya acuan yang digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan adalah garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Departemen terkait.

Adapun maksud tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataramadalah:

a. Maksud :

Memberikan Pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama atau kepercayaan serta menjadi pusat pendidikan kesehatan.

b. Tujuan :

1. Menjadi rumah sakit rujukan utama di Wilayah Nusa Tenggara Barat yang berstandar internasional;
2. Menciptakan kepuasan bagi semua pasien dan karyawan di Rumah sakit Umum Daerah Kota Mataram;
3. Menjadi pusat pendidikan kesehatan yang menciptakan tenaga-tenaga kesehatan berkualitas, professional dan berdaya saing;

4. Menjadi pusat penelitian untuk penemuan-penemuan baru bidang kesehatan yang berguna bagi seluruh masyarakat;
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, beretika dan professional.

D. KEGIATAN DAN PRODUK PELAYANAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka RSUD Kota Mataram melaksanakan kegiatan rutin memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain :

1. **Bidang Pelayanan Medik meliputi** :

a. Layanan Rawat Jalan Pagi:

- Poliklinik Ekskutif
- Poliklinik Bedah
- Poliklinik Bedah Tulang
- Poliklinik Obgyn
- Poliklinik Penyakit Dalam
- Poliklinik Anak
- Poliklinik Bedah Anak
- Poliklinik Saraf
- Poliklinik BedahSaraf
- Poliklinik Kulit dan Kelamin
- Poliklinik Mata
- Poliklinik THT
- Poliklinik Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi
- Poliklinik Gigi Umum dan Spesialis
- Poliklinik Gizi
- Poliklinik Jantung
- Poliklinik Paru
- Poliklinik Jiwa dan Adiksi
- Poliklinik Urologi
- Poliklinik Andrologi
- Poliklinik Geriatri
- Poliklinik Respirasi (Covid-19)

b.Layanan Poli Spesialis Sore :

- Poli Penyakit Dalam
- Poli Kandungan dan Kebidanan
- Poli Anak
- Poli Bedah Tulang
- Poli Mata
- Poli Penerbangan
- Poli Jantung
- Poli THT
- Poli Saraf
- Poli Bedah Anak

c. Layanan Rawat Inap :
   - Kelas VIP dan VVIP
   - Kelas I, II dan IIIA, IIIB, IIIC

d. Layanan IGD Terintegrasi 24 jam, Pelayanan Ambulans dan Emergency Rescue (MEMS)

e. ICU / ICCU / NICU / PICU

f. HCU (High Care Unit)/Stroke Center

g. Pelayanan Jantung Terpadu (PJT)/Intermedite

h. Instalasi Bedah Sentral (IBS)

i. Ruang Bersalin dan Nifas

j. Hemodalisa Center (HD)

k. Terapi Hipebaricx Chamber

l. Kateter Jantung dan Angiografi (Cathlab)

m. MCU (Medical Check Up)

2. **Bidang Pelayanan Penunjang meliputi**:
   a. Farmasi
   b. Laboratorium
   c. Radiologi
   d. InstalasiGizi
   e. Instalasi Kesehatan Lingkungan
   f. BDRS (Bank Darah Rumah Sakit)
   g. MRI dan CT Scan
   h. Pelayanan Gizi
   i. Pelayanan CSSD

j. Rekam Medis

k. Kamar Jenazah

l. Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit (IPRS)

3. **Bidang Pelayanan Keperawatan**

a. Pelayanan Home Care

4. **Bagian Umum dan Kepegawaian :**

a. Pelayanan Diklat/Pendidikan

5. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar memuat tentang nilai-nilai budaya kerja, dimana budaya kerja merupakan suatu komitmen yang disepakati bersama dan harus bisa diyakini oleh segenap *stakeholder* suatu organisasi. Budaya kerja adalah sesuatu yang harus dipegang teguh, agar perilaku anggota organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga budaya kerja dapat membentuk kebersamaan dan komitmen terhadap organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram memiliki Budaya Kerja yang merupakan panduan/pedoman bagi seluruh elemen terkait di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Budaya Kerja yang dianut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah:

a. Kebersamaan

- Menyadari bahwa dalam semua pekerjaan, kerjasama tim merupakan faktor terpenting dalam pelayanan untuk pencapaian kepuasan pelanggan.
- Mengutamakan kepentingan rumah sakit daripada kepentingan golongan, kelompok/pribadi.

b. Profesionalisme

- Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- Bersedia melakukan pekerjaan yang penuh tanggung jawab.
- Memiliki keyakinan atas kemampuan sendiri (kemandirian).
- Akan berusaha meningkatkan kemampuan secara aktif mengikuti dan mempelajari perkembangan ilmu dan teknologi supaya dapat memberikan yang terbaik bagi Rumah Sakit.

- Memegang teguh rahasia jabatan.

b. Kejujuran

- Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dengan berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan dan dan fakta yang ada secara proporsional.
- Transparan dan akuntabel dalam menjalankan sistem kerja.

c. Keterbukaan

- Terbuka dalam mengemukakan dan menerima, menghargai serta menghormati pendapatan orang lain dengan lapang dada.
- Mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi.

d. Disiplin

- Selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri, lingkungan kerja dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas.

6. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA .

Susunan pejabat pengelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Pemimpin BLUD	:	dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,K-FER
Pengelola Teknis BLUD	:	-
Pengelola Keuangan BLUD	:	-

Susunan DewanPengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Ketua	:	dr.H.Usman Hadi
Anggota	:	H.Moh. Syakirin Hukmi, SE. MM
Anggota	:	H.Masbuhin

BAB II

KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN BERJALAN

A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

1. Faktor Internal

a. Pelayanan Medis

Dalam operasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pasien umum dan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan dan Fasilitas yang diberikan kepada masyarakat itu meliputi:

1) Pelayanan IGD 24 jam Terintegrasi dan Mataram Emergency Medical Service (MEMS)
2) Pelayanan Rawat Inap Kls I, II, dan III
3) Pelayanan Rawat Inap Kls VIP dan VVIP
4) Pelayanan Rawat Jalan pagi-sore dan Eksekutif
5) Pelayanan Kamar Operasi
6) Pelayanan Radiologi
7) Pelayanan Laboratorium
8) Farmasi/Apotek 24 jam
9) Pelayanan ICU, ICU Covid/ICCU/Pelayanan Jantung Terpadu (Intermediet)
10) Pelayanan NICU/PICU
11) Pelayanan Ruang Bersalin dan Nifas
12) Pelayanan Hemodialisa
13) Pelayanan MRI Dan CT Scan
14) Pelayanan Gizi
15) Pelayanan Ambulans/Jenazah
16) Stoke Center
17) Pelayanan Farmasi/Antar Obat Gratis
18) Pelayanan Bank Darah
19) Pelayanan CSSD
20) Pelayanan Terapi Hiperbaric Chamber
21) Pelayanan Cathlab

22) Pelayanan Inseminasi (*Intrauterine Insemination*)
23) Rumah Duka/Kamar Jenazah
24) Pelayanan Diklat/Pendidikan.
25) Pelayanan home Care
26) Pelayanan Medical Tourism/Wisata Medis
27) Pelayanan Artis Cantik (Antar Obat Gratis cepat akurat dan Simpatik)
28) Pelayanan Permaisuri Dancing (Persalinan Aman Bayi Sehat Ibu Berseri dengan ANC rutin USG)

b. Keuangan

Asumsi Keuangan

1) Prediksi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp.160.000.000.000 dan proyeksi perubahan pendapatan tahun 2022 sudah ditetapkan dari pemerintah daerah sebesar Rp. 160.000.000.000
2) Pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
3) Biaya pegawai PNS masih disubsidi kecuali non PNS
4) Masih dimungkinkan subsidi investasi dari pemerintah daerah dan pusat.

c. Organisasi dan SDM

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Mataram mulai operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak Maret 2010, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1225/MENKES/SK/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram menjadi Rumah Sakit Kelas B.

Struktur Organisasi :

1)	Direktur	:	dr. Hj. NK Eka Nurhayati., Sp.O.G., Subsp., F.E.R., M.Kes., M.Sc
2)	Wadir Bid.Umum dan keuangan	:	dr. Emirald Isfihan., MARS
3)	Wadir Bid. Pelayanan	:	drg. Dianita Rahmi
4)	Kepala Bagian Program, Humas dan Rekam Medik	:	drg.Andre Sebastian., MARS
5)	Kepala Bagian Keuangan	:	Lalu Ery Setiawan., SE
6)	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	:	Lalu Budiawan., SKM.,MM
7)	Kepala Bidang Pelayanan Medik	:	dr.H. Tris Cahyoso., MARS
8)	Kepala Bagian Umum	:	Srianingsih., SST., M.Kes
9)	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	:	Fatwadi., S.Si., M.Ak
10)	Perencana	:	Lalu Muhammad Hadaytha., SE
11)	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	:	Baiq Suriayani., SIP
12)	Administrator Kesehatan	:	Afrina Susiarty., SST.,MM
13)	Analis Kepegawaian	:	Baiq Sukmawati., SE., MM
14)	Administrator Kesehatan	:	Susiana Hastuti., SKM., MM
15)	Administrator Kesehatan	:	Lalu Dedi Hidayat., S.Kep
16)	Administrator	:	Fafir Rahmah., S.Si., Apt

Kesehatan

17) Administrator Kesehatan : drg. Rina Yulia Wulandari
18) Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Putu Widhi Sudariani., S.Kep., Ns., M.Kep
19) Perencana : Astuti Sastrawati., SST
20) Pranata Kehumasan : Yuda Prasetya., S.Kep., Ns
21) Administrator Kesehatan : Zakaria Ahmad Ezis., SKM
22) Administrator Kesehatan : dr. Ni Wayan Suanita Kusumawardani
23) Kelompok Jabatan Fungsional dan Instalasi

JUMLAH TENAGA KESEHATAN / NON KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

No.	Jabatan	2022				Jumlah	Ket
		PNS	Non PNS	Mitra	OJT		
1	Direksi	21				21	
2	Dokter Spesialis						
	Obgyn	3	1			4	
	Penyakit Dalam	5	1			6	
	Bedah	4				4	
	Anak	3	1			4	
	Radiologi	2	1			3	
	Rehabilats Medik	1				1	
	Anestesi	2	1			3	
	Mata	2				2	
	Jantung	2	1	2		5	
	Patoligi Klinik	1	1			2	
	Patologi Anatomi	1	1			2	
	Urologi			1		1	
	Bedah Anak		1			1	
	Bedah Saraf			1		1	
	Orthopedi	2	1			3	
	Emergency Medicine			1		1	
	Paru	1		1		2	
	Jiwa	1				1	
	Kulit dan Kelamin	1	1			2	

	THT	3				3	
	Andrologi			1		1	
	Saraf	2		1		3	
	Kesehatan Penerbangan			1		1	
	Forensik			1		1	
	Akupuntur			1		1	
	Mikrobiologi Klinik			1		1	
3	Dokter Gigi Spesialis						
	Spesialis Penyakit Mulut	1				1	
	Spesialis Bedah Mulut			1		1	
	Spesialis Peridonsia	1				1	
	Total Dokter Spesialis	**38**		**13**		**51**	
4	Dokter Umum	22	47			69	
5	Dokter Gigi	5	1			6	
6	Perawat	91	289			380	
7	perawat Gigi	10	2			12	
8	Ortotis Protetis	3				3	
9	Penata Anastesi	10	3			13	
10	Bidan	24	61			85	
11	Perekam Medis	7	16			23	
12	Fisioterapis	7	9			16	
13	Akupasi terapi	3	1			4	
14	Terapis Wicara	3	1			4	
16	Laboratorium						
	- Analis Kesehatan	14	32			46	
	- APTD	1	3			4	
17	Laboratorium Inseminasi		2			2	
18	Nutrisionis	15	9			24	
19	Radiologi	7	7			14	
20	Apoteker	8	15			23	
21	Asisten Apoteker	16	37			53	
22	Elektromedis	7	1			8	
23	Sanitarian	5				5	
24	Pramusaji						
	- Tata Boga	1	13			14	
	- Makanan Cair	1	3			4	
	- Distribusi Makanan		12			12	
25	Pramuhusada	35	227		1	263	
26	Psikologi		1			1	
27	Programer		2			2	
28	Pemulasaran Jenazah					0	
29	Satpam		22			22	
30	Sopir					0	
	- Sopir IPJ		7			7	

	- Sopir PSC		10			10	
	- Sopir Umum		2			2	
31	Transpoter						
	- Transpoter Pasien		27			27	
	- Transporter Rekam Medik					0	
32	Tenaga Teknisi		13			13	
Jumlah		**354**	**886**	**13**	**1**	**1243**	

d. Sarana dan Prasarana

Status Kepemilikan : Pemerintah Kota Mataram

1. Kelas Rumah Sakit : B
2. Luas Tanah : 24.083 m^2
3. Luas Bangunan : 20.815 m^2
4. Fasilitas listrik : PLN sebanyak 1700 KVA/Megawatt
5. Fasilitas listrik Diesel : 1850 KVA
6. Fasilitas air :PDAM dan Pompa Bor Air Tanah
7. Fasilitas gas :Sentral Oksigen (O_2) Kapasitas 13 Ton
8. Fasilitas pengolahan limbah: Ipal Kapasitas 200 M^3 Incenerator 1 bh
9. Komunikasi : PABX
10. Tata Udara : AC Central
11. Peralatan : Medik, Non Medik
12. Transportasi : Ambulans 4 unit, Mobil Jenazah 5 unit, Mobil Dinas Operasional 7 unit, Sepeda Motor 10 unit

e. Faktor Eksternal

1) UU dan PP yang terkait dengan BLU

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kota Mataram;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram;
15. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).

2) Kebijakan Pemerintah untuk RS

Kebijakan Pemerintah terkait subsidi terhadap RS berupa dukungan dari pemerintah Kota Mataram Tahun 2022 dalam jumlah anggaran APBD Murni untuk bidang kesehatan khusus untuk Rumah Sakit Umum Kota Mataram sebesar Rp.160.000.000.000 terdiri dari PAD/Dana daerah lainnya

sebesar Rp.0,-; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.20.178.338.632,- Pembiayaan DBHCHT sebesar Rp.20.335.873.310,- , dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 0,- RSUD juga mendapatkan anggaran dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 0,- .Pada Bulan Juli tahun 2022 RSUD Kota Mataram mendapatkan tambahan anggraan yang berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 12.319.013.650., berupa Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Umum dan DBHCHT sebesar Rp. 5.000.000.000 untuk Kegiatan Belanja Obat-obatan dan Barang Habis Pakai serta Silpa dana BLUD sebesar Rp. 4.851.653.650 yang akan di alokasikan pada kegiatan Belanja Barang dan Jasa, sehingga Total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 213.228.265.593,-

Sedangkan Kebijakan Pemerintah terkait SDM/ PNS berupa Pegawai Negri Sipil (PNS) Kota Mataram sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan Kota Mataram, Tahun 2020 didukung oleh 5.170 orang pegawai negeri sipil. Dari total PNS yang ada di Kota Mataram yang menduduki golongan II sejumlah 36 orang, menduduki golongan III sejumlah 157 orang, dan menduduki golongan IV sejumlah 739 orang Di bandingkan dengan tahun 2020, ada kenaikan jumlah PNS di Kota Mataram, disebabkan karena adanya penambahan pegawai dari honor dan tenaga teknis untuk peningkatan pelayanan teknis terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3) Keadaan persaingan

Dalam strategi bersaing Rumah Sakit Umum Kota Mataram berusaha untuk menjadi Rumah Sakit yang ramah, profesional, unggulan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat kota Mataram dan sekitarnya. Strategi bersaing penentuan posisi suatu usaha bertujuan untuk

memaksimalkan nilai kemampuan yang memberdayakan dengan pesaing.

Dilihat dari posisi lokasi Rumah Sakit Umum Kota Mataram menempati lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah dan hal ini merupakan modal dasar yang sangat besar.

Tingkat fasilitas diantara pesaing, Rumah Sakit Umum Kota Mataram berupaya dengan meningkatkan mutu pelayanan untuk menuju pelayanan prima. Beberapa rumah sakit yang menjadi pesaing adalah Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Risa Medika, Rumah Sakit Umum Bhayangkara, Rumah Sakit Biomedika, Rumah Sakit TNI AD dan Rumah Sakit Karang Ujung, Rumah Sakit Harapan Keluarga, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Universitas Mataram (UNRAM), Rumah Sakit Permata Hati selain RSUP semuanya merupakan rumah sakit swasta dan rumah sakit milik Polri, TNI dan Universitas Mataram.

4) Globalisasi Ekonomi

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 2,07% persen. Kemudian di tahun 2021 menjadi 3,69%. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72%, sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sebesar 7,10%. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram terhadap pembentukan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2022 mencapai 7,76%. Peningkatan tekanan inflasi triwulan II 2022 terjadi baik di Kota Mataram tercatat sebesar 5,52% dan 4,85%, meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang masing-masing 2,46% dan 2,63%. Tekanan inflasi pada triwulan III 2022 diperkirakan berpotensi di atas rentang target inflasi nasional yakni 3±1% seiring dengan tren kenaikan harga komoditas global dan potensi adanya kebijakan penyesuaian

tarif untuk sejumlah komoditas dari kelompok *Administered Prices* (AP).

5) Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

Kota Mataram terbentuk pada tanggal 31 Agustus 1999, dengan luas wilayah 60,30 km2 dan yang terbagi atas 6 Kecamatan. Selain merupakan Ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram juga sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pusat Perekonomian barang dan jasa. Penyebaran penduduk di Kota Mataram menunjukkan penduduk usia muda 0-24 tahun sebesar 49,99%, kelompok usia 25-59 tahun sebesar 43,41% dan 60 tahun keatas sebesar 6,9%. Kondisi lainnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Dalam bidang pendidikan,tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu107,45 % dan yang terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 75,46 %. Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 95,86 % dan terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 71,32 %.

6) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menunjukkan jati dirinya dalam peradaban manusia dewasa ini. Peran perkembangan teknologi informasi telah memberikan share yang signifikan terhadap nilai tambah eknomi. Efisiensi dalam berbagai bidang, khusunya dalam masalah waktu, tenaga dan biaya melalui kecepatan dan ketepatan informasi. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh penjuru tanah air, bahkan mancanegara, maka penggunaan jasa dan fasilitas informasi dan telekominikasi

ditingkatkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga pada saatnya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Khususnya dalam bidang pemerintahan, E-government mengacu pada penggunaan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihakpihak lain.

B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DENGAN FAKTA YANG TEJADI

Perbandingan antara asumsi makro dan mikro dengan realisasi secara kuantitatif tertuang dalam tabel berikut :

1. ASPEK MAKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 2022	PROGNOSA 2021	Ket
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,5 %	6 %	-
2.	Tingkat Inflasi (%)	10 %	6 %	-
3.	Pertumbuhan Pasar (%)	30%	30%	-
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)	11%	11%	-
5.	Kurs 1 US$ (Rp)	15.260	14.270	-

2. ASPEK MIKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 2021	PROGNOSA 2020	Ket
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi *PSO (APBD & APBN)*	-	-	-
2.	Perubahan tarif layanan	Ada	Ada	-
3.	Pengembangan produk baru	Ada	Ada	-

4.	Peningkatan volume layanan	Ada	Ada	-
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan Perputaran piutang Perputaran persediaan	-	-	-

C.PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

1. NON KEUANGAN

a. Pelayanan (berdasarkan unit)

No.	UNIT PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 2022		KET
			Target	Realisasi (s/d Juni)	
1	Instalasi Gawat Darurat	Org	101.014	44.118	-
2	Instalasi Rawat Jalan	Org	198.976	83.976	-
3	Instalasi Rawat Inap	Org	19.355	6.582	-
	Jumlah		**319.266**	**134.676**	

1) Pelayanan (berdasarkan kelompok)

NO.	KEL. PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 2022			KET
			Target	Realisasi (S/D BlnJuni)	Prognosa	
1	Kunjungan Rwt Jalan	Org	198.976	83.976	115.000	-
2	Kunjungan IGD	Org	101.014	44.118	56.896	-
3	Pasien Rawat Inap	Org	19.355	6.582	12.773	-
4	B O R	%	75	67.9	7.1	-
5	L O S	Hari	6	4.1	1.9	-
6	T O I	Hari	3	2.5	0.5	-

2. KEUANGAN

a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	PENDAPATAN s/d Juni 2022			Selisih Realisasi (%) Dari Anggaran
		Anggaran	Realisasi	Prognosa	
1	Pelayanan Rawat Jalan	1,567,156,333	353,248,663	1,213,907,670	23%
2	Pelayanan Rawat Inap	4,251,934,924	2,752,140,400	1,499,794,524	65%
3	Pelayanan Rawat IGD	1,343,026,035	697,235,248	645,790,787	52%
4	Pelayanan Laboratorium	1,327,129,784	768,340,893	558,788,891	58%
5	Pelayanan Radiologi	574,772,729	302,172,995	272,599,734	53%
6	Pelayanan Bedah Sentral	511,879,011	239,958,157	271,920,854	47%
7	Pelayanan Farmasi	1,123,502,747	734,141,229	389,361,518	65%
8	Pelayanan Nicu	154,120,796	69,923,150	84,197,646	45%
9	Pelayanan Picu	36,984,154	19,903,663	17,080,491	54%
10	Pelayanan ICU	62,685,319	52,617,930	10,067,389	84%
11	Pelayanan ICCU	27,410,795	17,443,233	9,967,562	64%
12	Pelayanan Strokecentre	21,620,963	16,941,504	4,679,459	78%
13	Pelayanan Intermidite	74,828,791	60,345,594	14,483,197	81%
14	Pelayanan IPJ	20,000,000	15,430,000	4,570,000	77%
15	Pelayanan Hemodialisa	30,000,000	17,672,000	12,328,000	59%
16	Pelayanan Hiperbarik Chamber	60,000,000	39,912,190	20,087,810	67%
17	Pelayanan BDRS	55,257,286	35,923,000	19,334,286	65%
18	Pelayanan Poli Eksekutif	400,000,000	329,273,392	70,726,608	82%
19	Pelayanan Instalasi Gizi	94,286	60,000	34,286	64%
20	Pelayanan Ambulance	90,000,000	75,929,600	14,070,400	84%
21	Pelayanan Insiminasi	15,085,714	5,850,000	9,235,714	39%
22	Pelayanan Persalinan	25,000,000	12,600,000	12,400,000	50%
23	Pelayanan Home Care	150,000,000	110,208,408	39,791,592	73%
24	Home care	55,000,000	110,208,408	-55,208,408	200%

25	Pelayanan MCU	600,000,000	544,104,580.0	55,895,420	91%
26	Rehabilitasi medik	22,000,000	19,685,500	2,314,500	89%
27	Endoscopi	40,000,000	25,239,138	14,760,862	63%
28	Urologi	25,000,000	11,115,000	13,885,000	44%
29	Andrologi	-	100,000	-100,000	-
30	Akupuntur	-	32,348,000	-32,348,000	-
31	PCR Swab	-	184,607,193	-184,607,193	-
33	Penerimaan Pelayanan Jamkesda	55,368,973,211	53,428,518,564	1,940,454,647	96%
34	Penerimaan Pelayanan Non Jamkesda	-	-	-	-
35	Penerimaan Pelayanan BPJS	97,029,092,629	52,974,760,900	44,054,331,729	55%
36	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	401,800,000	329,893,273.38	71,906,727	82%
	Jumlah	165,464,355,507	114,387,851,805	51,076,503,702	69%

b. Biaya Berdasarkan Jenis Layanan

No	Uraian	Rincian Biaya			Jumlah
		Volume	Setahun	Harga Satuan	
I	BIAYA OPERASIONAL			Rp 154,320,000,000	Rp 154,320,000,000
A	Biaya Pelayanan			Rp 128,568,435,596	Rp 128,568,435,596
	1. Biaya Pegawai	1	Tahun	Rp 3,232,736,844	Rp 3,232,736,844
	2. Biaya Bahan	1	Tahun	Rp 41,000,000,000	Rp 41,000,000,000
	3. Biaya Jasa Pelayanan	1	Tahun	Rp 75,559,982,880	Rp 75,559,982,880
	4. Biaya Pemeliharaan	1	Tahun	Rp 44,460,000	Rp 44,460,000
	5. Biaya Barang dan Jasa	1	Tahun	Rp 8,231,255,872	Rp 8,231,255,872
	6. Biaya Pelayanan Lain-Lain	1	Tahun	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
B	Biaya Umum dan Administrasi			Rp 25,751,564,404	Rp 25,751,564,404
	1. Biaya Pegawai	1	Tahun	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
	2. Biaya Administrasi Kantor	1	Tahun	Rp 3,071,610,759	Rp 3,071,610,759
	3. Biaya Pemeliharaan	1	Tahun	Rp 3,450,046,499	Rp 3,450,046,499
	4. Biaya Barang dan Jasa	1	Tahun	Rp 13,829,907,146	Rp 13,829,907,146
	5. Biaya Promosi	1	Tahun	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000

	6. Biaya Umum dan Administrasi Lain	1	Tahun	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000
II	BIAYA NON OPERASIONAL			Rp 280,000,000	Rp 280,000,000
	1. Biaya Administrasi Bank		Tahun	Rp 280,000,000	Rp 280,000,000
III	BIAYA INVESTASI			Rp 5,000,000,000	Rp 5,000,000,000
	1.Tanah	1	Tahun		Rp -
	2.Bangunan	1	Tahun	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
	3.Peralatan dan Mesin	1	Tahun	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	Tahun	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
	5. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya	1	Tahun		Rp -
	6. Surat- Surat Berharga	1	Tahun		Rp -
IV	PENGELUARAN KSO			Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
	1.Biaya KSO	1	Tahun	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000
	jumlah (I+II+III+IV)			Rp 160,000,000,000	Rp 160,000,000,000
V	PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN			Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
	A. Pengeluaran Pembayaran Hutang				Rp -
	1. Pokok	1	Tahun	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
	2. Bungan dan Administrasi	1	Tahun		
	3. Komisi, Provisi, Denda	1	Tahun		
Jumlah (I+II+II+IV+V)					Rp 161,000,000,000

c. Pencapaian Program Investasi

NO	PROGRAM INVESTASI	TARGET TH. 2022	REALISASI 2022 (s.d. bln Juni)	PROGNOSA TH. 2022
1	**Jasa Layanan**	**1,500,000,000**		
	a. Tanah	-	-	-
	b. Bangunan & Gedung	1,000,000,000	2,192,104,750	-1,192,104,750
	c. Peralatan & Mesin	500,000,000	668,639,242	-168,639,242
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	32,608,000	-32,608,000
	e. Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	**Hibah**			
	a. Tanah	0	-	-

	b. Bangunan & Gedung	0	-	-
	c. Peralatan & Mesin	0	-	-
	d. Kendaraan	0	-	-
	e. Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	-	-
3	**Hasil Kerjasama**			
	a. Tanah	0	-	-
	b. Bangunan & Gedung	0	-	-
	c. Peralatan & Mesin	0	-	-
	d. Kendaraan	0	-	-
	e.Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	-	-
4	**APBD**			
	a. Tanah	0	-	-
	b. Bangunan & Gedung	0		
	c. Peralatan & Mesin	0		
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		
5	**APBN**	**5,000,000,000**		
	a. Tanah	0		
	b. Bangunan & Gedung	0		
	c. Peralatan & Mesin	5,000,000,000	0	-
	d. Kendaraan	0		
	e. Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0		
	Jumlah	**10,000,000,000**	**3,683,103,992**	**6,183,103,992.00**

d. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan

NO	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	*Satuan (bln)*	*Harga Satuan*	
1	Pembiayaan/Pengeluaran Pembayaran Pokok Pinjaman per september 2022	1	Thn	5,000,000,000	
1.1	**Biaya keterlambatan pembayaran klaim BPJS**				**0**
	***a. Pembayaran Jasa Pelayanan* (BPJS, BANSOS, ASURANSI LAINNYA, DAN UMUM)**				***47,753,608,752***

	Pembayaran Jasa layanan bulan Januari	1	bln	3,330,695,268	
	Pembayaran Jasa layanan bulan Februari	1	bln	2,234,175,131	
	Pembayaran Jasa layanan bulan maret	1	bln	6,010,114,205	
	Pembayaran Jasa layanan bulan April	1	bln	7,790,097,155	
	Pembayaran Jasa layanan bulan Mei	1	bln	7,243,101,985	
	Pembayaran Jasa layanan bulan Juni	1	bln	4,723,383,329	
	b.Pembayaran Bunga dan Administrasi				**42.500.000**
	- Pembayaran bunga bulan Mei	1	bln	58,453,273.00	58,453,273.00
	c .Pembayaran Admin dan Provisi	1	bln	238,949,527.00	238,949,527.00
	d. Pembayaran Komisi,provisi,denda,Adm				
	- Provinsi	1	bln		

F.LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN

1. N E R A C A

NERACA
PER 30 Juni 2022

No	Uraian	2022	2021
1	**ASET**	**476.206.137.093,58**	**476.206.137.093,58**
	ASET LANCAR	**84.274.100.433,29**	**84.274.100.433,29**
	Kas dan Setara Kas	4.851.653.650,73	4.851.653.650,73
	Kas di BLUD	4.851.653.650,73	4.851.653.650,73
	Kas di BLUD	4.851.653.650,73	4.851.653.650,73
	Kas di BLUD	4.851.653.650,73	4.851.653.650,73
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	83.966.014.289,75	83.966.014.289,75
	Piutang Pendapatan BLUD	83.966.014.289,75	83.966.014.289,75
	Piutang Pendapatan BLUD	83.966.014.289,75	83.966.014.289,75
	Piutang Pendapatan BLUD	83.966.014.289,75	83.966.014.289,75
	Penyisihan Piutang	(20.991.548.670,19)	(20.991.548.670,19)
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(20.991.548.670,19)	(20.991.548.670,19)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(20.991.548.670,19)	(20.991.548.670,19)
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(20.991.548.670,19)	(20.991.548.670,19)
	Persediaan	16.447.981.163,00	16.447.981.163,00
	Barang Pakai Habis	16.447.981.163,00	16.447.981.163,00
	Bahan	261.848.567,00	261.848.567,00
	Bahan Lainnya	261.848.567,00	261.848.567,00

	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	68.567.478,00	68.567.478,00
	Alat Tulis Kantor	7.136.000,00	7.136.000,00
	Bahan Cetak	55.571.478,00	55.571.478,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.860.000,00	5.860.000,00
	Obat-obatan	16.117.565.118,00	16.117.565.118,00
	Obat	16.117.565.118,00	16.117.565.118,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**84.274.100.433,29**	**84.274.100.433,29**
2	**ASET TETAP**	**354.545.347.305,65**	**354.545.347.305,65**
	Tanah	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
	Tanah	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
	Tanah Persil	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
	Peralatan dan Mesin	398.662.699.588,87	398.662.699.588,87
	Alat Besar	3.702.067.526,00	3.702.067.526,00
	Alat Bantu	3.702.067.526,00	3.702.067.526,00
	Electric Generating Set	3.254.527.776,00	3.254.527.776,00
	Alat Bantu Lainnya	447.539.750,00	447.539.750,00
	Alat Angkutan	4.161.809.548,59	4.161.809.548,59
	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.161.809.548,59	4.161.809.548,59
	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.639.383.298,59	2.639.383.298,59
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	75.000.000,00	75.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	134.534.000,00	134.534.000,00
	Kendaraan Bermotor Khusus	1.312.892.250,00	1.312.892.250,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	364.664.320,00	364.664.320,00
	Alat Bengkel Bermesin	296.571.820,00	296.571.820,00
	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	287.130.000,00	287.130.000,00
	Peralatan Las	9.441.820,00	9.441.820,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin	68.092.500,00	68.092.500,00
	Perkakas Standard (Standard Tools)	68.092.500,00	68.092.500,00
	Alat Pertanian	213.045.500,00	213.045.500,00
	Alat Pengolahan	213.045.500,00	213.045.500,00
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	12.000.000,00	12.000.000,00
	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	201.045.500,00	201.045.500,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.064.986.597,19	41.064.986.597,19
	Alat Kantor	22.024.137.327,62	22.024.137.327,62
	Mesin Ketik	5.000.000,00	5.000.000,00
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.800.000,00	8.800.000,00
	Alat Reproduksi (Penggandaan)	398.800.000,00	398.800.000,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	113.553.000,00	113.553.000,00
	Alat Kantor Lainnya	21.497.984.327,62	21.497.984.327,62
	Alat Rumah Tangga	19.040.849.269,57	19.040.849.269,57
	Mebel	6.248.869.980,00	6.248.869.980,00
	Alat Pengukur Waktu	30.343.000,00	30.343.000,00

	Alat Pendingin	2.969.264.410,00	2.969.264.410,00
	Alat Dapur	529.719.300,00	529.719.300,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.915.069.579,57	8.915.069.579,57
	Alat Pemadam Kebakaran	347.583.000,00	347.583.000,00
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.461.880.328,00	1.461.880.328,00
	Alat Studio	1.364.041.178,00	1.364.041.178,00
	Peralatan Studio Gambar	1.364.041.178,00	1.364.041.178,00
	Alat Komunikasi	97.839.150,00	97.839.150,00
	Alat Komunikasi Telephone	97.839.150,00	97.839.150,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	341.391.048.996,09	341.391.048.996,09
	Alat Kedokteran	278.780.743.489,10	278.780.743.489,10
	Alat Kedokteran Umum	195.853.444.391,07	195.853.444.391,07
	Alat Kedokteran Gigi	24.514.000,00	24.514.000,00
	Alat Kedokteran Bedah	27.667.158.317,70	27.667.158.317,70
	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.135.131.065,00	4.135.131.065,00
	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	12.309.000.000,00	12.309.000.000,00
	Alat Kedokteran Poliklinik	166.347.200,00	166.347.200,00
	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.809.737.890,33	1.809.737.890,33
	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	29.775.000,00	29.775.000,00
	Alat Kedokteran Gawat Darurat	14.882.014.916,00	14.882.014.916,00
	Alat Kedokteran ICCU	21.717.220.709,00	21.717.220.709,00
	Alat Kedokteran Lainnya	186.400.000,00	186.400.000,00
	Alat Kesehatan Umum	62.610.305.506,99	62.610.305.506,99
	Alat Kesehatan Matra Laut	4.798.876.900,00	4.798.876.900,00
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	57.811.428.606,99	57.811.428.606,99
	Alat Laboratorium	3.012.169.550,00	3.012.169.550,00
	Unit Alat Laboratorium	68.200.000,00	68.200.000,00
	Alat Laboratorium Patologi	68.200.000,00	68.200.000,00
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00
	System/Power Supply	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.797.000.000,00	1.797.000.000,00
	Proteksi Lingkungan	1.797.000.000,00	1.797.000.000,00
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	76.969.550,00	76.969.550,00
	Pemesinan:Model Ship Workshop	76.969.550,00	76.969.550,00
	Komputer	3.291.027.223,00	3.291.027.223,00
	Komputer Unit	1.633.932.023,00	1.633.932.023,00
	Personal Computer	1.633.932.023,00	1.633.932.023,00
	Peralatan Komputer	1.657.095.200,00	1.657.095.200,00
	Peralatan Mainframe	717.194.300,00	717.194.300,00
	Peralatan Personal Computer	388.153.900,00	388.153.900,00
	Peralatan Jaringan	523.172.000,00	523.172.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya	28.575.000,00	28.575.000,00
	Gedung dan Bangunan	181.445.684.607,07	181.445.684.607,07
	Bangunan Gedung	181.445.684.607,07	181.445.684.607,07

	Bangunan Gedung Tempat Kerja	181.445.684.607,07	181.445.684.607,07
	Bangunan Gedung Kantor	74.236.481.894,21	74.236.481.894,21
	Bangunan Gudang	1.375.704.250,00	1.375.704.250,00
	Bangunan Gedung Instalasi	331.642.150,00	331.642.150,00
	Bangunan Kesehatan	92.755.164.909,75	92.755.164.909,75
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	110.650.000,00	110.650.000,00
	Bangunan Gedung Garasi/Pool	315.400.000,00	315.400.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.320.641.403,11	12.320.641.403,11
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.670.099.601,00	12.670.099.601,00
	Bangunan Air	745.750.000,00	745.750.000,00
	Bangunan Air Bersih/Air Baku	148.950.000,00	148.950.000,00
	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	148.950.000,00	148.950.000,00
	Bangunan Air Kotor	596.800.000,00	596.800.000,00
	Bangunan Pembuang Air Kotor	596.800.000,00	596.800.000,00
	Instalasi	4.761.258.798,00	4.761.258.798,00
	Instalasi Air Bersih/Air Baku	873.199.750,00	873.199.750,00
	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	873.199.750,00	873.199.750,00
	Instalasi Air Kotor	1.792.468.298,00	1.792.468.298,00
	Instalasi Air Kotor Lainnya	1.792.468.298,00	1.792.468.298,00
	Instalasi Gardu Listrik	227.383.000,00	227.383.000,00
	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	227.383.000,00	227.383.000,00
	Instalasi Gas	1.688.086.750,00	1.688.086.750,00
	Instalasi Jaringan Pipa Gas	1.091.196.500,00	1.091.196.500,00
	Instalasi Gas Lainnya	596.890.250,00	596.890.250,00
	Instalasi Lain	180.121.000,00	180.121.000,00
	Instalasi Lain	180.121.000,00	180.121.000,00
	Jaringan	7.163.090.803,00	7.163.090.803,00
	Jaringan Air Minum	1.687.081.621,00	1.687.081.621,00
	Jaringan Pembawa	1.687.081.621,00	1.687.081.621,00
	Jaringan Listrik	4.679.519.182,00	4.679.519.182,00
	Jaringan Transmisi	4.679.519.182,00	4.679.519.182,00
	Jaringan Telepon	379.840.500,00	379.840.500,00
	Jaringan Telepon di atas Tanah	379.840.500,00	379.840.500,00
	Jaringan Gas	416.649.500,00	416.649.500,00
	Jaringan Pipa Gas Transmisi	416.649.500,00	416.649.500,00
	Aset Tetap Lainnya	240.187.000,00	240.187.000,00
	Bahan Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00
	Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000.000,00	50.000.000,00
	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	190.187.000,00	190.187.000,00
	Alat Bercorak Kebudayaan	190.187.000,00	190.187.000,00
	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	190.187.000,00	190.187.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(262.314.556.299,29)	(262.314.556.299,29)

	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(245.252.467.574,29)	(245.252.467.574,29)
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(245.252.467.574,29)	(245.252.467.574,29)
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(245.252.467.574,29)	(245.252.467.574,29)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(15.447.810.122,00)	(15.447.810.122,00)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(15.447.810.122,00)	(15.447.810.122,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(15.447.810.122,00)	(15.447.810.122,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.614.278.603,00)	(1.614.278.603,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.614.278.603,00)	(1.614.278.603,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(1.614.278.603,00)	(1.614.278.603,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**354.545.347.305,65**	**354.545.347.305,65**
3	**ASET LAINNYA**	**37.386.689.354,64**	**37.386.689.354,64**
	Aset Tidak Berwujud	3.245.292.000,00	3.245.292.000,00
	Aset Tidak Berwujud	3.245.292.000,00	3.245.292.000,00
	Aset Tidak Berwujud	3.245.292.000,00	3.245.292.000,00
	Goodwill	464.715.800,00	464.715.800,00
	Software	2.780.576.200,00	2.780.576.200,00
	Aset Lain-lain	36.030.732.675,64	36.030.732.675,64
	Aset Lain-lain	36.030.732.675,64	36.030.732.675,64
	Aset Lain-lain	36.030.732.675,64	36.030.732.675,64
	Aset Rusak Berat/Usang	36.030.732.675,64	36.030.732.675,64
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.889.335.321,00)	(1.889.335.321,00)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.889.335.321,00)	(1.889.335.321,00)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.889.335.321,00)	(1.889.335.321,00)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.889.335.321,00)	(1.889.335.321,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**37.386.689.354,64**	**37.386.689.354,64**
4	**KEWAJIBAN**	**63.429.983.015,00**	**63.429.983.015,00**
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**63.429.983.015,00**	**63.429.983.015,00**
	Utang Bunga	26.666.667,00	26.666.667,00
	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	26.666.667,00	26.666.667,00
	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	26.666.667,00	26.666.667,00
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	26.666.667,00	26.666.667,00
	Utang Belanja	63.403.316.348,00	63.403.316.348,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	63.403.316.348,00	63.403.316.348,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.403.316.348,00	63.403.316.348,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.403.316.348,00	63.403.316.348,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**63.429.983.015,00**	**63.429.983.015,00**

	JUMLAH KEWAJIBAN	**63.429.983.015,00**	**63.429.983.015,00**
5	**EKUITAS**	**412.776.154.078,58**	**412.776.154.078,58**
	EKUITAS	**412.776.154.078,58**	**412.776.154.078,58**
	Ekuitas	402.480.192.677,58	412.776.154.078,58
	Ekuitas	412.776.154.078,58	412.776.154.078,58
	Ekuitas	412.776.154.078,58	412.776.154.078,58
	Ekuitas	412.776.154.078,58	412.776.154.078,58
	Surplus/Defisit-LO	(10.295.961.401,00)	0,00
	Surplus/Defisit-LO	(10.295.961.401,00)	0,00
	Surplus/Defisit-LO	(10.295.961.401,00)	0,00
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.295.961.401,00	0,00
	RK PPKD	10.295.961.401,00	0,00
	RK PPKD	10.295.961.401,00	0,00
	RK PPKD	10.295.961.401,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	**412.776.154.078,58**	**412.776.154.078,58**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**476.206.137.093,58**	**476.206.137.093,58**

2. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni TAHUN 2021 dan 2022

Uraian		Realisasi 2022	Realisasi 2021
KAS DAN SETARA KAS			
	Kas di Bank	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
PIUTANG			
	Pasien JKN/BPJS/Kerjasama	-	-
	Pasien Umum	-	-
	Pasien tidak mampu	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
PENYISIHAN PIUTANG			
	Pasien JKN/BPJS/Kerjasama	-	-
	Pasien Umum, tidak mampu dan lainnya	-	-
UANG MUKA BELANJA			
	Uang Muka Belanja	-	-
PERSEDIAAN			
	Obat dan BHP		
	Gizi		
	ATK dan Cetakan		
	Alat RT		
ASET TETAP			
	Tanah	-	-

	Peralatan dan Mesin	-	-
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-
ASET LAINNYA			
	Dana Kelolaan	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Aset Lain-lain	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
UTANG PIHAK III			
	Obat dan BHP	-	-
	Gizi	-	-
	Utang Lainnya	-	-
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
	Utang Jasa Pelayanan/honorarium	-	-
	Utang Listrik	-	-
	Utang Air	-	-
	Utang Telepon	-	-
	Jasa Konsultan	-	-
	Tiket dan Akomodasi	-	-
UTANG JANGKA PANJANG			
	Utang Bank/Sewa Diterima Dimuka	-	-
EKUITAS			
	Ekuitas Awal	-	-
	Surplus/Defisit s/d Periode Lalu	-	-
	Surplus/Defisit Periode Berjalan	-	-
	Setoran ke Kas Daerah	-	-
PENDAPATAN JASA LAYANAN			
	Pasien JKN/BPJS/Kerjasama		71.527.782.736,00
	Pasien Umum		7.629.935.974,67
	Pasien Tidak Mampu		5.323.140.234,00
PENDAPATAN HIBAH APBN			
	Hibah Tunai		-
	Hibah Barang		-
PENDAPATAN SEWA			-
	Pendapatan Sewa		-
PENDAPATAN APBD			
	UP/GU/TU		-
	LS		10.295.961.401,00

	Barang		-
PENDAPATAN APBN			
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
	Pendapatan Sewa		271.068.533,28
BEBAN OPERASIONAL			
	Beban Pegawai	14.126.420.967,00	
	Beban Persediaan	3.743.565.484,06	
	Beban Jasa Pelayanan	31.370.210.127,00	
	Beban Pemeliharaan	7.500.000,00	
	Beban Langganan Daya dan Jasa	24.098.304.815,84	
	Beban Perjalanan Dinas	-	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	
	Beban Bunga	-	
	Beban Penyisihan Piutang	(7.443.054.778,06)	
KEGIATANNON OPERASIONAL			
	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		
	Kerugian Penurunan Nilai Aset		
	Surplus/Defisit Non Operasional Lainnya		
Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan		5.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	
Jumlah		66.902.946.615,84	100.047.888.878,95

3. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
PER 30 Juni TAHUN 2021 dan 2022

Uraian		LAK	
KAS DAN SETARA KAS		2022	2021
	Kas di Bank		
	Kas di Bendahara Penerimaan		
	Kas di Bendahara Pengeluaran		
PIUTANG			
	Pasien JKN/BPJS/Kerjasama		
	Pasien Umum		
	Pasien tidak mampu		
	Piutang Lainnya		
PENYISIHAN PIUTANG			
	Pasien JKN/BPJS/Kerjasama		
	Pasien Umum, tidak mampu dan lainnya		

UANG MUKA BELANJA			
	Uang Muka Belanja		
PERSEDIAAN			
	Obat dan BHP		
	Gizi		
	ATK dan Cetakan		
	Alat RT		
ASET TETAP			
	Tanah		
	Peralatan dan Mesin	-	
	Gedung dan Bangunan	668.639.242,00	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.192.104.750,00	
	Aset Tetap Lainnya	32.608.000,00	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
ASET LAINNYA			
	Dana Kelolaan		
	Aset Tak Berwujud		
	Aset Lain-lain	-	
	Akumulasi Amortisasi	-	
UTANG PIHAK III			
	Obat dan BHP		
	Gizi		
	Utang Lainnya		
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
	Utang Jasa Pelayanan/honorarium		
	Utang Listrik		
	Utang Air		
	Utang Telepon		
	Jasa Konsultan		
	Tiket dan Akomodasi		
UTANG JANGKA PANJANG			
	Utang Bank/Sewa Diterima Dimuka		
EKUITAS			
	Ekuitas Awal		
	Surplus/Defisit s/d Periode Lalu		
	Surplus/Defisit Periode Berjalan		
	Setoran ke Kas Daerah		
PENDAPATAN JASA LAYANAN			
	Pasien JKN/BPJS/Kerjasama		
	Pasien Umum		106.652.142.083,00

	Pasien Tidak Mampu		7.629.935.973,92
PENDAPATAN HIBAH APBN			-
	Hibah Tunai		
	Hibah Barang		-
PENDAPATAN SEWA			-
	Pendapatan Sewa		
PENDAPATAN APBD			-
	UP/GU/TU		
	LS		-
	Barang		10.295.961.401,00
PENDAPATAN APBN			-
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
BEBAN OPERASIONAL			242.068.533,28
	Beban Pegawai		
	Beban Persediaan	14.126.420.967,00	
	Beban Jasa Pelayanan	31.711.516.240,00	
	Beban Pemeliharaan	31.331.567.073,00	
	Beban Langganan Daya dan Jasa	7.500.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas	24.138.663.835,84	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	
	Beban Bunga	-	
	Beban Penyisihan Piutang	-	
KEGIATANNON OPERASIONAL		-	
	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		
	Kerugian Penurunan Nilai Aset	-	
	Surplus/Defisit Non Operasional Lainnya	-	
Pembiayaan		-	
	Penerimaan Pembiayaan		
	Pengeluaran Pembiayaan		
Jumlah		**104.209.020.107,84**	**249.640.215.982,40**

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI

1. Analisis Internal

a. Kondisi Pelayanan Medis

1) Kekuatan

Dalam operasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pasien umum, Jamkesmas, maupun Jamkesda. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu meliputi:

1. Pelayanan IGD 24 jam Terintegrasi dan Mataram Emergency Medical Service (MEMS)
2. Pelayanan Rawat Inap Kls I, II, dan III
3. Pelayanan Rawat Inap Kls VIP A,VIP B dan VIP Nifas
4. Pelayanan Rawat Jalan pagi-sore dan Eksekutif
5. Pelayanan Kamar Operasi
6. Pelayanan Radiologi
7. Pelayanan Laboratorium
8. Farmasi / Apotek 24 jam
9. Pelayanan ICU/ICCU/Pelayanan Jantung Terpadu
10. Pelayanan NICU/PICU
11. Pelayanan Ruang Bersalin dan Nifas
12. Pelayanan Hemodialisa
13. Pelayanan MRI Dan CT Scan
14. Pelayanan Gizi
15. Pelayanan Ambulans/Jenazah
16. HCU (High Care Unit)/Stoke Center
17. Pelayanan Farmasi/Antar Obat Gratis
18. Pelayanan Bank Darah
19. Pelayanan CSSD
20. Pelayanan Terapi Hiperbaric Chamber
21. Pelayanan Cathlab/Pelayanan Jantung Terpadu
22. Pelayanan Insiminasi Bayi Tabung (Intrauterine Insemination)

23. Rumah Duka/Kamar Jenazah
24. Pelayanan Diklat/Pendidikan.
25. Pelayanan home Care
26. Pelayanan Artis Cantik (Antar Obat Gratis cepat akurat dan Simpatik)
27. Pelayanan Permaisuri Dancing (Persalinan Aman Bayi Sehat Ibu Berseri dengan ANC rutin USG)

2) Kelemahan

a. *Health Education* masih perlu memenuhi standar akreditasi baru.
b. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan.
c. Belum diterapkannya reward dan punishment.
d. Komitmen SDM belum maksimal.

b. Kondisi Keuangan

1) Kekuatan

a) *Gross Ratio (GR)*

Pertumbuhan pendapatan untuk RBA pada tahun ini dinaikkan 20% diharapkan dapat tercapai.

Tabel III.A.1.1 Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2021 - 2022

NO	TAHUN	PENDAPATAN (Rp.)	GR (%)
1	2021	93.578.682.341,24	-
2	2022	124.820.107.991,20	34%

*)*Sumber Data : Lap. Semester I Bagian Keuangan*

b) *Cost Recovery Ratio (CRR)* keuangan apabila gaji diperhitungkan 103,733% sehingga rumah sakit masih memerlukan subsidi dan jika gaji tidak diperhitungkan 101,343%.

Tabel III.A.1.2.CRR dengan Gaji dan Tanpa Gaji Tahun 2022

NO	TAHUN	PENDAPATAN	BIAYA OPERASIONAL (DG GAJI)	CRR (%)	SUBSIDI (%)

1	2022	124.820.107.991,20	101.315.668.116	123%	23%
NO	TAHUN	PENDAPATAN	BIAYA OPERASIONAL (TANPA GAJI)	CRR (%)	SUBSIDI (%)
1	2022	124.820.107.991,20	94.559.416.658,84	132%	32%

*)Sumber Data : Lap. Semester IBagian Keuangan (Lap.LAK)

c) Likuiditas

1. Cash Ratio

Kemampuan kas untuk membayar kewajiban jangka pendek belum bisa mencukupi karena pada per 30 Juni tahun 2022 sebesar 17,48% artinya RSUD harus menunggu piutang BPJS untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel III.A.1.3. Kemampuan kas guna membayar kewajiban jangka pendek Tahun 2021/2022

*)Sumber Data: Lap. Semester I Bagian Keuangan (Lap.Neraca)

NO	TAHUN	KAS	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*CASH RATIO (%)*
1	2021	4.851.653.651	63.403.316.348,00	7,7%
2	2022	29.462.741.534,36	35.342.945.816,06	83,4%

2. Current Ratio

Kemampuan RS menggunakan seluruh aset lancar guna membayar seluruh kewajiban jangka pendek belum maksimal pada *Semester I* tahun 2022 sebesar 130,45% sehingga rumah sakit masih membutuhkan subsidi guna

membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar bila sewaktu-waktu dilikuidir.

Tabel III.A.1.4. Kemampuan aset lancar guna membayar kewajiban jangka pendek Tahun 2021/2022

NO	TAHUN	ASET LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*CURRENT RATIO (%)*
1	2021	84.274.280.824	63.403.316.348	132,9%
2*	2022	86.465.500.563,17	35.342.945.816,06	244,6%

)Sumber Data: Semester IBagian Keuangan (Lap.Neraca)

4. Solvabilitas Ratio

Kemampuan Rumah Sakit dalam membayar semua kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada semester I tahun 2022 sebesar 18,66% sehingga rumah sakit mampu membayar semua kewajibannya bila sewaktu-waktu dilikuidir.

Tabel III.A.1.5. Kemampuan Total aset untuk membayar total kewajiban tahun 2021/2022

NO	TAHUN	TOTAL ASET	TOTAL KEWAJIBAN	*SOLVABILITAS RATIO (%)*
1	2021	385.032.268.042,26	58.518.946.890,67	15,18%
2	2022	433.908.865.910.24	80.959.948.846.50	18,66%

)Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.Neraca)

2) Kelemahan :

a. Masih membutuhkan subsidi belanja pegawai (Gaji PNS)
b. Masih membutuhkan subsidi/ bantuan dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah untuk membiayai total biaya termasuk biaya operasional dan investasi.

1. Operating Ratio

Operating ratio mencerminkan tingkat efisiensi BLUD, Jika rasio yang tinggi maka menunjukkan keadaan yang kurang baik karena setiap rupiah pendapatan yang terserap dalam biaya, juga tinggi, dan yang tersedia untuk surplus kecil. Tetapi rasio yang tinggi mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor intern yang dapat dikendalikan oleh manajemen, tetapi juga faktor ekstern misalnya faktor harga yang sulit dikendalikan oleh manajemen, kebijakan rujukan BPJS berjenjang dan kebijakan bebas biaya untuk warga kota mataram yang dirawat di kelas III:

Tabel III.A.1.6. Tingkat Efisiensi BLUD Semester I tahun 2022

NO	TAHUN	*Biaya Pelayanan*	Biaya Umum dan Administrasi	*Total Pendapatan*	*OR (%)*
1	2021	82.734.132.277	14.011.254.003,75	93.578.682.341,2	1,03
2	2022	74.443.171.927	16.576.534.788	95.047.888.878,95	1,78

*)*Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.LO, Beban Operasional)*

$$\frac{\text{Biaya Pelayanan + Biaya Umum dan Administrasi}}{\text{Total Pendapatan}} = \ldots \%$$

6. Return on Investment (ROI)

Rasio Tingkat Pengembalian Investasi (Return on Investment, ROI) Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas investasi yang digunakan dapat menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, investasi yang dihitung disini hanya investasi yang memberikan konstribusi terhadap pencapaian pendapatan. Demikian halnya dengan biaya investasi. Biaya Investasi ada yang berupa investasi belum selesai atau investasi tidak operasional. Oleh karena itu juga tidak diikutsertakan dalam pengertian biaya investasi.

Tabel III.A.1.7. Tingkat Efektifitas Aset terhadap Pendapatan BLUD Semester I tahun 2022

NO	TAHUN	Total Pendapatan	*Aktiva Operasi*	*ROI (%)*
1	2021	93.578.682.341,24	105.265.829.494,00	88,89 %
2	2022	95.047.888.878,95	100.013.994.455,11	95,03 %

**)Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.LO dan Lap.Neraca)*

7. Return on Equity (ROE)

   ROE yaitu Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang diperoleh dari penanaman modal.Pengertian modal disini adalah semua modal yang tertanam, termasuk di dalamnya Surplus/silpa. Rumus perhitungannya :

   ROE = Laba bersih sesudah pajak: Ekuitas x 100

Tabel III.A.1.8. Tingkat Pengembalian Equitas BLUD Semester I tahun 2022

NO	TAHUN	*Surplus/ Silpa*	Equitas	*ROE (%)*
1	2021	697.946.742	427.398.684.174	0.15%
2	2022	24.611.087.883,36	460.543.626.437,11	5,3%

**)Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.LO dan Neraca)*

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Mataram mulai operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak Maret 2010, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1225/MENKES/SK/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram menjadi Rumah Sakit Kelas B.

Struktur Organisasi :

• Direktur	:	dr. Hj. NK Eka Nurhayati., Sp.O.G., Subsp., F.E.R., M.Kes., M.Sc
• Wadir Bid.Umum dan keuangan	:	dr. Emirald Isfihan., MARS
• Wadir Bid. Pelayanan	:	drg. Dianita Rahmi
• Kepala Bagian Program, Humas dan Rekam Medik	:	drg.Andre Sebastian., MARS
• Kepala Bagian Keuangan	:	Lalu Ery Setiawan., SE
• Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	:	Lalu Budiawan., SKM.,MM
• Kepala Bidang Pelayanan Medik	:	dr.H. Tris Cahyoso., MARS
• Kepala Bagian Umum	:	Srianingsih., SST., M.Kes
• Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	:	Fatwadi., S.Si., M.Ak
• Perencana	:	Lalu Muhammad Hadaytha., SE
• Analis Keuangan Pusat dan Daerah	:	Baiq Suriayani., SIP
• Administrator Kesehatan	:	Afrina Susiarty., SST.,MM
• Analis Kepegawaian	:	Baiq Sukmawati., SE., MM
• Administrator Kesehatan	:	Susiana Hastuti., SKM., MM
• Administrator Kesehatan	:	Lalu Dedi Hidayat., S.Kep
• Administrator Kesehatan	:	Fafir Rahmah., S.Si., Apt

- Administrator Kesehatan : drg. Rina Yulia Wulandari
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Putu Widhi Sudariani., S.Kep., Ns., M.Kep
- Perencana : Astuti Sastrawati., SST
- Pranata Kehumasan : Yuda Prasetya., S.Kep., Ns
- Administrator Kesehatan : Zakaria Ahmad Ezis., SKM
- Administrator Kesehatan : dr. Ni Wayan Suanita Kusumawardani
- Dewan Pengawas
- Komite Etik Dan Hukum
- Komite Medik
- Komite Keperawatan
- Komite Farmasi dan Terapi
- Satuan Pengawas Intern (SPI)
- Kelompok Jabatan Fungsioal.

JUMLAH TENAGA KESEHATAN / NON KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

No.	Jabatan	2022			Jumlah	Ket
		PNS	Non PNS	Mitra		
1	Direksi	19			19	
2	Dokter Spesialis					
	Obgyn	3	1		4	
	Penyakit Dalam	5	1		6	
	Bedah	4			4	
	Anak	3	1		4	
	Radiologi	2	1		3	
	Rehabilats Medik	1			1	
	Anestesi	2	1		3	
	Mata	2			2	
	Jantung	2	1	2	5	
	Patoligi Klinik	1	1		2	
	Patologi Anatomi	1	1		2	
	Urologi			1	1	
	Bedah Anak		1		1	
	Bedah Saraf			1	1	
	Orthopedi	2	1		3	

	Emergency Medicine			1	1	
	Paru	1		1	2	
	Jiwa	1			1	
	Kulit dan Kelamin	1	1		2	
	THT	3			3	
	Andrologi			1	1	
	Saraf	2		1	3	
	Kesehatan Penerbangan			1	1	
	Forensik			1	1	
	Akupuntur			1	1	
	Mikrobiologi Klinik			1	1	
3	Dokter Gigi Spesialis					
	Spesialis Penyakit Mulut	1			1	
	Spesialis Bedah Mulut			1	1	
	Spesialis Peridonsia	1			1	
	Total Dokter Spesialis	**38**		**13**	**51**	
4	Dokter Umum	22	46		68	
5	Dokter Gigi	5	1		6	
6	Perawat	91	288		379	
7	perawat Gigi	10	2		12	
8	Ortotis Protetis	3				
9	Penata Anastesi	10	3		13	
10	Bidan	24	61		85	
11	Perekam Medis	7	16		23	
12	Fisioterapis	7	9		16	
13	Akupasi terapi	3	1		4	
14	Terapis Wicara	3	1		4	
16	Laboratorium					
	- Analis Kesehatan	14	32		46	
	- APTD	1	3		4	
17	Laboratorium Inseminasi		2		2	
18	Nutrisionis	14	9		23	
19	Radiologi	7	7		14	
20	Apoteker	8	14		22	
21	Asisten Apoteker	16	37		53	
22	Elektromedis	6	1		7	
23	Sanitarian	5			5	
24	Pramusaji					
	- Tata Boga	1	13		14	
	- Makanan Cair	1	3		4	
	- Distribusi Makanan		12		12	
25	Pramuhusada	35	226		261	
26	Psikologi		1		1	
27	Programer		2		2	
28	Pemulasaran Jenazah				0	
29	Satpam		22		22	

30	Sopir				0	
	- Sopir IPJ		7		7	
	- Sopir PSC		10		10	
	- Sopir Umum		2		2	
31	Transpoter					
	- Transpoter Pasien		27		27	
	- Transporter Rekam Medik				0	
32	Tenaga Teknisi		13		13	
Jumlah		**350**	**882**	**13**	**1231**	

Indentifikasi kondisi eksisting dianalisa menggunakan **analisis SWOT**

1. Kekuatan dan kelemahan

1.1 Kekuatan

M1: *Man* (Sumber Daya Manusia)

a. Adanya sistem pengembangan staf berupa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan
b. Terdapat tenaga dokter spesialis dan subspesialis yang cukup lengkap
c. Memiliki Sumber Daya Manusia yang muda dan mempunyai semangat untuk berkembang

M2: *Material* (Sarana Prasarana)

a. Alat-alat penunjang medis cukup lengkap
b. Bagunan dan sarana prasarana yang cukup lengkap

M3:*Method* (Metode)

a. RS Memiliki Visi, Misi sebagai acuan melaksanakan kegiatan pelayanan
b. Sudah dilakukan assesment kompetensi bagi tenaga medis
c. Mempunyai protap untuk setiap tindakan
d. Sudah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Wisata Medis/Hospital tourism

M4:*Money* (Keuangan)

a. Ada pendapatan dari jasa pelayanan rumah sakit berupa remunerasi
b. Pembiayaan dari BLUD, APBD dan sumber pembiayaan lainnya

M5: Mutu

a. Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
b. Digitalisasi pelayanan

c. Adanya variasi karakteristik pasien (BPJS, UMUM, Asuransi lainnya)
d. Sebagai lahan praktik mahasiswa Kesehatan

1.2 Kelemahan

M1: *Man* (Sumber Daya Manusia)

a. Etos kerja dan *sense of crisis* yang kurang dari SDM yang ada.
b. Kesejahteraan karyawan tidak merata.

M2: *Material* (Sarana Prasarana)

a. Penataan letak ruangan yang tidak terintegrasi satu sama lain.
b. Lahan yang kurang untuk pengembangan Rumah Sakit, termasuk lahan parkir untuk pengunjung Rumah Sakit.

M3:*Method* (Metode)

a. Pelaksanaan digitalisasi pelayanan yang belum optimal
b. Pelayanan RSUD Kota Mataram belum mewujudkan PCC (*Patient Center Care*), sehingga belum optimal dan berdaya saing
c. Pelayanan keperawatan RSUD Kota Mataram belum sesuai standar yang diharapkan
d. *Multi Disiplinround* (MDR) belum terlaksana sehingga LOS meningkat

M4:*Money* (Keuangan)

a. Administrasi keuangan belum akuntabel

M5: Mutu

a. LOS yang memanjang
b. Penumpukan pasien di IGD

2. Tantangan dan peluang

2.1 Tantangan (M1-M5)

a. Adanya tuntutan tinggi dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih profesional
b. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan hukum
c. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
d. Persaingan antar RS yang semakin ketat
e. Terbatasnya peningkatan kualitas SDM
f. Bebasnya Pers yang dapat langsung menyebarkan informasi dengan cepat

2.2 Peluang (M1-M5)

a. Adanya program pelatihan karyawan dari diklat
b. Adanya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
c. RSUD Kota Mataram merupakan RS Pendidikan
d. Adanya program akreditasi RS dari pemerintah melalui KARS
e. Pendanaan untuk pengembangan sumber daya dari pemerintah

d. Sarana dan Prasarana

Status Kepemilikan : Pemerintah Kota Mataram

1. Kelas Rumah Sakit	:	B
2. Luas Tanah	:	24.083 m^2
3. Luas Bangunan	:	20.815 m^2
4. Fasilitas listrik	:	PLN sebanyak 1700 KVA/Megawatt
5. Fasilitas listrik Diesel	:	1850 KVA
6. Fasilitas air	:	PDAM dan Pompa Bor Air Tanah
7. Fasilitas gas	:	Sentral Oksigen (O_2) Kapasitas 13 Ton
8. Fasilitas pengolahan Limbah	:	Ipal Kapasitas 200 M^3 Incenerator 1 bh
9. Komunikasi	:	PABX
10. Tata Udara	:	AC Central
11. Peralatan	:	Medik Non Medik
12. Transportasi	:	Ambulans 4 unit Mobil Jenazah 5 unit Mobil Dinas Operasional 7 unit Sepeda Motor 10 unit

1) Kekuatan:
   a) Sarana pelayanan sangat memadai
   b) Cukup tersedia alat canggih
   c) Lokasi rumah sakit yang strategis
   d) Fasilitas gedung yang luas dan nyaman

2) Kelemahan:

a) Penyempurnaan Sistem SIMRS secara optimal dan modul SIM masih perlu di inovasi untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang maksimal.
b) Lahan Parkir yang semakin kurang karena bertambahnya kendaraan bermotor dan bertambahnya gedung.
c) Jadwal pemeliharaan dan kecepatan perbaikan sarana prasarana yang belum tepat waktu.

2. Analisis Eksternal

1. UU dan PP yang terkait dengan BLU

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah;
e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah;
f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
h) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
i) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram;
l) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kota Mataram;

m) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

n) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram.

o) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).

2. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk Rumah Sakit

Dukungan dari pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 dalam jumlah anggaran RKA sebelum perubahan untuk bidang kesehatan khusus Rumah Sakit Umum Kota Mataram diperkirakan sebesar Rp.263.538.418.425,-. Dengan alokasi Belanja untuk belanja Operasi sebesar Rp. 222,816.204.557,-, Belanja Pegawai ASN sebesar Rp. 25.927.211.059,- dan Belanja Non Operasional sebesar Rp. 40.722.213.868,-. Subsidi dari Pemerintah Kota masih digunakan untuk membiayai operasional Rumah Sakit dan untuk membiayai sarana dan prasarana Rumah Sakit, sedangkan dari target pendapatan jasa layanan tahun 2023 masih sebesar Rp. 160.000.000.000,- sama dengan tahun sebelumnya.

3. Kebijakan Pemerintah tentang SDM / PNS

Pegawai Negri Sipil (PNS) Kota Mataram sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan Kota Mataram, Tahun 2020 didukung oleh 5.170 orang pegawai negeri sipil. Dari total PNS yang ada di Kota Mataram, 2,15% menduduki golongan I, 23,67% menduduki golongan II, 43,18% golongan III dan 31% golongan IV. Di bandingkan dengan tahun 2008, ada kenaikan jumlah PNS di Kota Mataram, disebabkan karena adanya penambahan pegawai dari honor dan tenaga teknis untuk peningkatan pelayanan teknis terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Perkembangan Sosial Budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

Kota Mataram terbentuk pada tanggal 31 Agustus 1999, dengan luas wilayah 60,30 km2 dan yang terbagi atas 6 Kecamatan. Selain merupakan Ibukota Propinsi NTB, Kota Mataram juga sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pusat Perekonomian barang dan jasa. Penyebaran penduduk di Kota Mataram menunjukkan penduduk usia muda 0-24 tahun sebesar 49,99%, kelompok usia 25-59 tahun sebesar 43,41% dan 60 tahun keatas sebesar 6,9%. Kondisi lainnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Dalam bidang pendidikan, tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 107,45 % dan yang terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 75,46 % . Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 95,86 % dan terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 71,32 %.

5. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menunjukkan jati dirinya dalam peradaban manusia dewasa ini. Peran perkembangan teknologi informasi telah memberikan share yang signifikan terhadap nilai tambah eknomi. Efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga dan biaya melalui kecepatan dan ketepatan informasi. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh penjuru tanah air, bahkan mancanegara, maka penggunaan jasa dan fasilitas informasi dan telekominikasi ditingkatkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga pada saatnya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Khususnya dalam bidang pemerintahan, E- government mengacu pada penggunaan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.

Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak pihak lain.

6. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan

Dalam strategi bersaing Rumah Sakit Umum Kota Mataram berusaha untuk menjadi Rumah Sakit yang ramah, profesional, unggulan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat kota Mataram dan sekitarnya. Strategi bersaing penentuan posisi suatu usaha bertujuan untuk memaksimalkan nilai kemampuan yang memberdayakan dengan pesaing.

Dilihat dari posisi lokasi Rumah Sakit Umum Kota Mataram menempati lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah dan hal ini merupakan modal dasar yang sangat besar.

Tingkat fasilitas diantara pesaing, Rumah Sakit Umum Kota Mataram berupaya dengan meningkatkan mutu pelayanan untuk menuju pelayanan prima. Beberapa rumah sakit yang menjadi pesaing adalah Rumah Sakit Umum Propinsi, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Risa Medika, Rumah Sakit Umum Bhayangkara, Rumah Sakit Biomedika, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit TNI AD dan Rumah Sakit Karang Ujung dan Rumah Sakit Harapan Keluarga, selain RSUP semuanya merupakan rumah sakit swasta dan rumah sakit milik Polri dan TNI.

7. Globalisasi Ekonomi

Pada Tahun 2019, secara makro laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mencapai 8,74 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yang hanya mencapai pertumbuhan sebesar 7,76 %, hal ini disebabkan adanya beberapa sektor ekonomi yang mengalami peningkatan terutama untuk sektor bangunan dan Perdagangan. Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat

pada tahun 2011 sebesar 8,18 %. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram terhadap pembentukan PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2011 mencapai 13,97 %.

Kontribusi PDRB Kota Mataram terhadap PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat masih di dominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberikan kontribusi sebesar 38,33 %, kemudian diikuti oleh sektor keuangan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 32, 91 %. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terkecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,11 %.

B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN

Perbandingan antara asumsi makro dan mikro dengan realisasi secara kuantitatif tertuang dalam tabel berikut :

1. ASPEK MAKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 2022	PROGNOSA 2021	Ket
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7%	7%	
2.	Tingkat Inflasi (%)	6,5%	6,5%	
3.	Pertumbuhan Pasar (%)	10 %	10 %	
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)	11%	11%	
5.	Kurs 1 US$ (Rp)	15.000	14.500	
6.	Dst.....			

2. ASPEK MIKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 2022	PROGNOSA 2021	Ket
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi *PSO*			
2.	Perubahan tarif layanan	Ada	Ada	
3.	Pengembangan produk baru	Ada	Ada	
4.	Peningkatan volume layanan	Ada	Ada	

5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan			

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

C. SASARAN, TARGET, KINERJA DAN KEGIATAN

1. a. Pelayanan (berdasarkan kelompok)

NO	KELOMPOK PELAYANAN	SASARAN	TARGET	KINERJA	KEG.
1	Kunjungan Rawat Jalan	224.760	157.240	161.256	
2	Kunjungan IGD	69.200	55.548	66.013	
3	Pasien Rawat Inap	28.500	39.323	20.448	
4	B O R	85%	56,47%	60.05%	
5	L O S	3	3	3	
6	T O I	2	2	2	

2. b. Pelayanan (berdasarkan unit)

NO	KELOMPOK PELAYANAN	SASARAN	TARGET	KEGIATAN
1	Instalasi Gawat Darurat	80.200	90.548	
2	Instalasi Rawat Jalan	172.400	217.240	
3	Instalasi Rawat Inap	39.600	40.832	

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

1. Program

Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

a. Pelayanan**,** terdiri dari :

1) Meningkatkan Mutu Layanan IGD dan Rawat Jalan
2) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Inap
3) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Intensif
4) Meningkatkan Mutu Layanan Bedah Sentral
5) Meningkatkan Mutu Layanan Laboratorium
6) Meningkatkan Mutu Layanan Radiologi
7) Meningkatkan Mutu Layanan Gizi
8) Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi
9) Meningkatkan Mutu Layanan CSSD
10) Meningkatkan Mutu Layanan Sanitasi
11) Meningkatkan Mutu Layanan IPSRS

12) Meningkatkan Mutu Layanan Hemodialisa

b. Pendukung Pelayanan, terdiri dari :

1) Unit Kerja Keuangan
2) Unit Kerja Perencanaan dan Pelaporan
3) Unit Kerja Umum, Humas dan Kepegawaian
4) Unit Kerja Pelayanan Medis
5) Unit Kerja Keperawatan
6) Unit Kerja Penunjang Medis
7) Unit Kerja Penunjang non Medis

E. PERKIRAAN PENDAPATAN

1. Pendapatan Pelayanan Umum

NO	UNIT PELAYANAN	Satuan	2023
I	**1. Pendapatan Pasien Umum**	1 tahun	29.895.783.398

2. Pendapatan JKN/BPJS

NO	UNIT PELAYANAN	Satuan	2023
I	**1. Pendapatan JKN/BPJS**	1 tahun	**126.127.249.702**

3. Pendapatan Kerjasama Operasional

NO	UNIT PELAYANAN	Satuan	2023
1	**1. Pendapatan Jaminan Pasien Miskin**	1 tahun	2.679.300.100

4. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah

NO	UNIT PELAYANAN	Satuan	2023
I	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**	1 tahun	**704.000.000**
	a. Penerimaan Jasa Giro	1 tahun	269.000.000
	b. Pendidikan dan Diklat	1 tahun	280.000.000
	c. Taxi	1 tahun	0
	d. Sewa	1 tahun	35.000.000

	e. Pendapatan lain-lain	1 tahun	120.000.000

5. Pendapatan Lainnya

NO	UNIT PELAYANAN	Satuan	2023
I	**Parkir**	1 tahun	33.000.000
II	**Hibah**	1 tahun	-
III	**Pendapatan Hasil Kerjasama**	1 tahun	-
IV	**APBD**	1 tahun	**32.516.204.557**
V	**APBN (DBHCHT & DAK)**	1 tahun	**71.022.213.868**
VI	**SILPA BLUD**	1 tahun	

6. Total Pendapatan BLUD

NO	UNIT PELAYANAN	Satuan	2023
I	**1. Pendapatan Pelayanan Pasien Umum**	1 tahun	29,895,783,398.00
	2. Pendapatan JKN/BPJS	1 tahun	126,720,916,502.00
	3. Penerimaan Jaminan Pasien Miskin	1 tahun	2,679,300,100
	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	1 tahun	159,296,000,000.00
II	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**		
	1 Penerimaan Jasa Giro	1 tahun	98,000,000.00
	2 Pendidikan dan Diklat	1 tahun	400,000,000.00
	3 Taxi	1 tahun	0
	4 Sewa	1 tahun	52,000,000
	5 Pendapatan lain-lain	1 tahun	70,000,000

	Jumlah Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1 tahun	**620,000,000.00**
	Jumlah I + II	1 tahun	**159,916,000,000.00**
III	**Parkir**	1 tahun	**84,000,000**
IV	**Hibah**	1 tahun	--
V	**Pendapatan Hasil Kerjasama**	1 tahun	-
VI	**APBD**	1 tahun	**32.516.204.557**
VII	**APBN (DBHCHT)**	1 tahun	**71.022.213.868**
VIII	**SILPA BLUD**	1 tahun	**-**
	Jumlah Pendapatan	1 tahun	**263.538.418.425**

F. PERKIRAAN BIAYA

1. Perkiraan Biaya

NO	URAIAN	RINCIAN		**2023**
		Vol.	Satuan	
I	BIAYA OPERASIONAL	1	Tahun	158.500.000.000,00
II	BIAYA NON OPERASIONAL	1	Tahun	1.000.000.000,00
III	BIAYA INVESTASI	1	Tahun	500.000.000,00
Jumlah				**160.000.000.000,00**
IV	BIAYA PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
V	PENGELUARAN PARKIR	1	Tahun	
VI	APBD	1	Tahun	**32.516.204.557**
VII	APBN	1	Tahun	**71.022.213.868**
VIII	SILPA BLUD	1	Tahun	**4.851.653.650**
Jumlah				**213.228.265.593**

G. ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan BLUD

NO	UNIT PELAYANAN	Satuan	2022
I	**1. Pendapatan Pasien Umum**	1 tahun	**16.017.000.000**
	2. Pendapatan JKN/BPJS	1 tahun	**143.983.000.000**
	3. Penerimaan Jaminan Pasien Miskin	1 tahun	0
	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	1 tahun	
II	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**		
	1 Penerimaan Jasa Giro	1 tahun	134.000.000
	2 Pendidikan dan Diklat	1 tahun	500.000.000
	3 Taxi	1 tahun	
	4 Sewa	1 tahun	
	5 Pendapatan lain-lain	1 tahun	366.000.000
	Jumlah Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1 tahun	**160.000.000.0000**
	Jumlah I + II	1 tahun	
III	**Parkir**	1 tahun	**-**
IV	**Hibah**	1 tahun	-
V	**Pendapatan Hasil Kerjasama**	1 tahun	**-**
VI	**APBD**	1 tahun	**22.840.748.632**
VII	**APBN (DBHCHT)**	1 tahun	**25.335.873.310**
VIII	**SILPA BLUD**	1 tahun	**4.851.653.650**
	Jumlah Pendapatan		**213.028.265.592**

2. ANGGARAN BIAYA/PENGELUARAN

Program : Peningkatan Pelayanan BLUD		
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan		
Indikator	**Tolok ukur kinerja**	**Target kinerja**
Input	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya	100%
Output	1. Pelayanan Kunjungan Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik 2. Keuangan Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif Dan Operatif Asuhan Keperawatan	100%

	Tindakan Khusus Elektromedik	

RINCIAN BELANJA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) RSUD KOTA MATARAM TAHUN 2023

No	URAIAN	RINCIAN BIAYA			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
I	**BIAYA OPERASI**				**158.501.316.960**
A	**Biaya Pelayanan**				**143.279.845.420**
	1. Biaya Pegawai				**15.232.736.844**
	1. Gaji dan tunjangan pegawai non PNS 2. Tambahan Penghasilan pegawai	1	Tahun	15.232.736.844	15.232.736.844
	2. Biaya Bahan				**50.600.000.000**
	1. Biaya obat dan BHP medis	12	Bulan	2.800.000.000	33.600.000.000
	2. Biaya Alkes	12	Bulan	200.000.000	2.400.000.000
	3.Biaya bahan dan alat laboratorium	12	Bulan	400.000.000	4.800.000.000
	4. Biaya bahan dan alat radiologi	12	Bulan	400.000.000	4.800.000.000
	5. Biaya bahan makan pasien	12	Bulan	250.000.000	3.000.000.000
	6. Biaya darah PMI	1	Tahun	2.000.000.000	2.000.000.000
	3. Biaya Jasa Pelayanan				**61.097.108.576**
	1. Pembayaran Jasa Pelayanan	12	Bulan	5.000.000.000	60.000.000.000
	2. Pembayaran Jasa Pelayanan Poli Eksekutif dan KSO	1	Tahun	1.097.108.576	1.097.108.576
	4. Biaya Pemeliharaan				**1.500.000.000**
	1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi	1	Tahun	400.000.000	400.000.000
	2. Biaya pemeliharaan alkes	1	Tahun	400.000.000	400.000.000
	3. Biaya pemeliharaan reuse	1	Tahun		

	Hemodilisa			400.000.000	400.000.000
	4. Biaya pemeliharaan jaringan penunjang sarana medis	1	Tahun	300.000.000	300.000.000
	5. Biaya Barang dan Jasa				**14.650.000.000**
	1. Biaya perlengkapan ruang rawat inap	1	Tahun	250.000.000	250.000.000
	2. Biaya linen	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
	3. Biaya cetak	12	Bulan	100.000.000	1.200.000.000
	4. Biaya gas (medis)	12	Bulan	400.000.000	4.800.000.000
	5. Biaya Jasa Konsultan	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
	6. Pembiayaan securityguard	12	Bulan	75.000.000	900.000.000
	6. Biaya Jasa Kebersihan	12	Bulan	200.000.000	2.400.000.000
	7. Biaya KSO	12	Bulan	400.000.000	4.800.000.000
	6. Biaya Lain-Lain				**200.000.000**
	1. Biaya pelayanan pasien	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
	2. Biaya umum	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
B	**Biaya Umum dan Adminsitrasi**				**15.021.471.540**
	1. Biaya Pegawai				**1.800.000.000**
	1. Pembayaran Honorarium Dokter Interensif	12	Tahun	100.000.000	1.200.000.000
	2. Pembayaran Honorarium Kepala Ruangan	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
	3. Pembayaran Honorarium	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
	4. Pembayaran Tunjangan Bahaya Radiasi	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
	2. Biaya Administrasi Kantor				**2.771.564.400**
	1. Biaya benda pos dan	1	Tahun		

	pengiriman			25.000.000	25.000.000
	2. Biaya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	125.000.000	1.500.000.000
	3. Biaya Cetak dan Penggandaan	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
	4. Biaya Kepustakaan	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
	5. Biaya pakaian dinas dan atribut	1	Tahun	250.000.000	250.000.000
	6. Biaya makan harian pegawai	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
	7. Biaya pelatihan	1	Tahun	250.000.000	250.000.000
	8. Biaya perjalanan dinas luar daerah	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
	9. Biaya lelang	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
	10. Biaya dokumentasi	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
	11. Biaya piket	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
	12. Biaya honorarium kepanitiaan	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
	13. Biaya keanggotaan	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
	14. Biaya perizinan	1	Tahun	21.564.400	21.564.400
	3. Biaya Pemeliharaan				**2.500.000.000**
	1. Biaya pemeliharaan gedung	1	Tahun	1.500.000.000	1.500.000.000
	2. Biaya pemeliharaan instalasi/jaringan	1	Tahun	250.000.000	100.000.000
	3. Biaya pemeliharaan kendaraan	1	Tahun	250.000.000	250.000.000
	4. Biaya pemeliharaan teknologi informasi	1	Tahun	250.000.000	100.000.000
	5. Biaya pemeliharan alat kantor dan RT	1	Tahun	250.000.000	550.000.000
	4. Biaya Barang dan Jasa				**7.199.907.140**
	1. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan	12	Bulan	20.000.000	240.000.000
	2. Biaya bahan bakar (BBM)	12	Bulan	50.000.000	600.000.000
	3. Biaya bahan gas	12	Bulan	20.000.000	240.000.000
	4. Biaya bahan dan alat dapur	1	Tahun	100.000.000	100.000.000

	5. Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
	6. Biaya peralatan listrik dan elektronik	12	Bulan	25.000.000	300.000.000
	7. Biaya peralatan kerja	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
	8. Biaya peralatan kantor dan RT	1	Tahun	250.000.000	250.000.000
	9. Biaya perlengkapan kantor dan RT	1	Tahun	250.000.000	250.000.000
	10. Biaya jasa konsultan	1	Tahun	30.000.000	30.000.000
	11. Biaya peningkatan manajemen terpadu	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
	12. Biaya peningkatan mutu SDM	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
	13. Biaya jasa pengembangan SIMRS dan RM	1	Tahun	150.000.000	150.000.000
	14. Biaya jasa kebersihan	-	-	-	-
	15. Biaya jasa loundry	12	Bulan	125.000.000	1.500.000.000
	16. Biaya jasa sewa	1	Tahun	9.907.140	9.907.140
	17. Biaya jasa pemeriksaan air,udara, gas	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
	18. Biaya jasa dewan pengawas	12	Bulan	7.500.000	90.000.000
	19. Biaya listrik	12	Bulan	250.000.000	3.000.000.000
	20. Biaya air	12	Bulan	2.500.000	30.000.000
	21. Biaya telepon	12	Bulan	5.000.000	60.000.000
	5. Biaya Promosi				**300.000.000**
	1. Biaya Promosi	1	tahun	300.000.000	300.000.000
	6. Biaya Umum dan Administrasi				**450.000.000**
	1. Biaya bingkisan lebaran dan hari raya	1	Tahun	50.000.000	50.000.000
	2. Biaya administrasi bank	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
	3. Biaya lain-lain	1	Tahun	200.000.000	200.000.000

	BIAYA NON OPERASIONAL				**200.000.000**
	1. Biaya Administrasi Bank	1	Tahun	200.000.000	200.000.000
II	**BELANJA MODAL**				**1.498.683.040**
	1. Tanah	1	Tahun	-	-
	2. Bangunan	1	Tahun	-	-
	3. Peralatan dan Mesin	1	Tahun	1.498.683.040	1.498.683.040
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	Tahun	-	-
	5. Pengeluaran sarana Fisik Lainnya	1	Tahun	-	-
	6. Surat-Surat Berharga	1	Tahun	-	-
	PENGELUARAN KSO	1	Tahun	-	**-**
	Jumlah (I+II+III+IV)	1	Tahun	160.000.000.000	**160.000.000.000**
	PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN 1. Hutang Pokok 2. Bunga dan Administrasi 3. Komisi, Provisi, denda				
	JUMLAH (I+II+III+IV+V)				**160.000.000.000**

Direktur
RSUD Kota Mataram

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG, K-FER
NIP. 19720403 200212 2 004

H. AMBANG BATAS RENCANA BISNIS ANGGARAN

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Prosentase
2022	164.851.653.651	204.858.682.984,00	40.007.029.333,00	24%
2021	140.000.000.000	143.486.421.795,35	3.486.421.795,35	2%
2020	130.000.000.000	189.810.606.863,96	59.810.606.864	46%
			Jumlah	73%
			AMBANG BATAS	**24%**

I. PERKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN

TAHUN	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
TA. 2020	214.963.249.307.31	130.000.000.000.00
TA. 2021	244.257.487.028.00	140.000.000.000.00
TA. 2022	195.858.682.984,00	164.000.000.000.00
TA. 2023	267.256.170.911.00	160.000.000.000.00

3. Anggaran Biaya/Pengeluaran APBD dan BLUD TA.2022

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2022

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**199.409.251.942**	**1.500.000.000**	**0**	**0**	**200.909.251.942**	**206.528.265.593**	**6.500.000.000**	**0**	**0**	**213.028.265.593**	**12.119.013.651**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**178.678.338.632**	**1.500.000.000**	**0**	**0**	**180.178.338.632**	**186.192.392.283**	**2.249.982.000**	**0**	**0**	**188.442.374.283**	**8.264.035.651**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**20.178.338.632**	**0**	**0**	**0**	**20.178.338.632**	**22.445.698.632**	**0**	**0**	**0**	**22.445.698.632**	**2.267.360.000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur		20.178.338.632	0	0	0	20.178.338.632	22.445.698.632	0	0	0	22.445.698.632	2.267.360.000	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749.982.000**	**0**	**0**	**749.982.000**	**749.982.000**	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DBH CHT	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur		0	0	0	0	0	0	749.982.000	0	0	749.982.000	749.982.000	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.040.000**	**0**	**0**	**0**	**395.040.000**	**395.040.000**	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur		0	0	0	0	0	395.040.000	0	0	0	395.040.000	395.040.000	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**158.500.000.000**	**1.500.000.000**	**0**	**0**	**160.000.000.000**	**163.351.653.651**	**1.500.000.000**	**0**	**0**	**164.851.653.651**	**4.851.653.651**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur		158.500.000.000	1.500.000.000	0	0	160.000.000.000	163.351.653.651	1.500.000.000	0	0	164.851.653.651	4.851.653.651	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**20.730.913.310**	**0**	**0**	**0**	**20.730.913.310**	**20.335.873.310**	**4.250.018.000**	**0**	**0**	**24.585.891.310**	**3.854.978.000**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**20.730.913.310**	**0**	**0**	**0**	**20.730.913.310**	**20.335.873.310**	**4.250.018.000**	**0**	**0**	**24.585.891.310**	**3.854.978.000**	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DBH CHT	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur		0	0	0	0	0	0	4.250.018.000	0	0	4.250.018.000	4.250.018.000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	DBH CHT	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur		19.311.129.659	0	0	0	19.311.129.659	16.228.697.012	0	0	0	16.228.697.012	(3.082.432.647)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH CHT	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur		1.419.783.651	0	0	0	1.419.783.651	4.107.176.298	0	0	0	4.107.176.298	2.687.392.647	
Rencana Penarikan Dana per Bulan																				

BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG

A. PROYEKSI PENDAPATAN

No.	Komponen	Proyeksi Operasional					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN							
4	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**112,513,270,790.28**	**135,019,465,939**	**154,689,299,277.77**	**162,423,764,241.66**	**170,544,952,453.74**	**179,072,200,076.43**
4.1.	**PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM**	**112,513,270,790.28**	**135,019,465,939**	**154,689,299,277.77**	**162,423,764,241.66**	**170,544,952,453.74**	**179,072,200,076.43**
4.1.1.	**Penerimaan Pelayanan Pasien Umum**	**21,556,756,829**	**19,657,969,796**	**18,477,137,483.93**	**19,400,994,358.13**	**20,371,044,076.03**	**21,389,596,279.83**
1.	Layanan Rawat Jalan	1,210,336,154	1,149,943,401	958,967,130	1,006,915,486.50	1,057,261,260.83	**1,110,124,323.87**
2.	Layanan Rawat Inap	8,267,813,116	6,474,342,869	6,571,213,568	6,899,774,246.40	7,244,762,958.72	**7,607,001,106.66**
3.	Layanan Rawat IGD	1,589,189,269	1,392,973,434	1,229,499,787	1,290,974,776.35	1,355,523,515.17	**1,423,299,690.93**
4.	Layanan Laboratorium	1,953,056,915	1,817,667,155	1,554,134,422	1,631,841,143.10	1,713,433,200.26	**1,799,104,860.27**
5.	Layanan Radiologi	884,912,731	895,609,760	427,853,497	449,246,171.85	471,708,480.44	**495,293,904.46**
6.	Layanan Bedah Sentral	1,323,330,567	916,671,521	643,892,999	676,087,648.95	709,892,031.40	**745,386,632.97**
7.	Layanan Farmasi	3,450,924,150	3,123,872,891	2,718,275,812	2,854,189,602.60	2,996,899,082.73	**3,146,744,036.87**
8.	Layanan Nicu	438,653,859	365,550,098	168,528,983	176,955,432.15	185,803,203.76	**195,093,363.95**
9	Layanan Picu	190,136,444	138,637,720	62,899,158	66,044,115.90	69,346,321.70	**72,813,637.78**
10.	Layanan ICU	500,937,862	255,527,034	352,970,524	370,619,050.20	389,150,002.71	**408,607,502.85**
11.	Layanan ICCU	214,369,490	116,708,704	14,631,480	15,363,054.00	16,131,206.70	**16,937,767.04**
12.	Layanan STR	239,264,210	237,464,464	125,948,061	132,245,464.05	138,857,737.25	**145,800,624.12**
13.	Layanan ITM	91,863,754	84,317,435	61,732,239	64,818,850.95	68,059,793.50	**71,462,783.17**
14.	Layanan IPJ	16,056,000	9,315,000	38,254,000	40,166,700.00	42,175,035.00	**44,283,786.75**
15.	Hemodialisa	36,476,132	24,563,150	50,715,192	53,250,951.60	55,913,499.18	**58,709,174.14**
16.	Hiperbarik	108,343,900	123,277,105	140,547,207	147,574,567.35	154,953,295.72	**162,700,960.50**
17.	BDRS	260,706,000	235,990,000	138,271,300	145,184,865.00	152,444,108.25	**160,066,313.66**
18.	Poli Sore	199,712,562	50,559,332	2,815,548,805	2,956,326,245.25	3,104,142,557.51	**3,259,349,685.39**
19.	Poli Eksekutif	296,846,601	1,953,996,150	165,000	173,250.00	181,912.50	**191,008.13**
20.	Instalasi Gizi	450,000	370,000	164,872,596	173,116,225.80	181,772,037.09	**190,860,638.94**
21.	Ambulance	127,717,113	118,630,223	958,967,130	1,006,915,486.50	1,057,261,260.83	**1,110,124,323.87**
22.	Persalinan	155,660,000	138,221,500	95,580,000	100,359,000.00	105,376,950.00	**110,645,797.50**
23.	Insiminasi	-	11,187,000	20,850,000	21,892,500.00	22,987,125.00	**24,136,481.25**
24.	Home Care	-	22,573,850	94,161,724	98,869,810.20	103,813,300.71	**109,003,965.75**
25.	MEMS	-	-	12,431,250	13,052,812.50	13,705,453.13	**14,390,725.78**
26.	MCU	-	-	15,192,750	15,952,387.50	16,750,006.88	**17,587,507.22**
4.1.2.	**Penerimaan Pelayanan dari Jaminan**	**87,714,803,431**	**107,698,322,131**	**129,351,940,999**	**142,610,514,951**	**142,610,514,951**	**149,741,040,699**
1	Penerimaan BPJS	86,947,021,710	106,010,479,769	127,900,068,830	141,009,825,885	141,009,825,885	**148,060,317,179**
2	Penerimaan Inhealth	9,411,476	29,949,494	62,675,141	69,099,343	69,099,343	**72,554,310**

3	Jasa Raharja	733,322,895	848,353,263	1,100,553,506	1,213,360,240	1,213,360,240	**1,274,028,252**
4	Jamsostek		85,020,070	70,521,045	77,749,452	77,749,452	**81,636,925**
5	Smile Train		16,500,000	33,000,000	36,382,500	36,382,500	**38,201,625**
6	BNI Life		685,710,178	5,323,448	5,869,101	5,869,101	**6,162,556**
7	Yayasan Kesehatan		22,309,357	56,454,614	62,241,212	62,241,212	**65,353,273**
8	PT. PP		-	15,082,761	16,628,744	16,628,744	**17,460,181**
9	Fullerton		-	28,476,955	31,395,843	31,395,843	**32,965,635**
10	Gum		-	9,756,000	10,755,990	10,755,990	**11,293,790**
11	Gerung		-	26,900,000	29,657,250	29,657,250	**31,140,113**
12	PT. PLN		-	43,128,699	47,549,391	47,549,391	**49,926,860**
13	RS Siti Hajar		-	-	-	-	**-**
14	Owlexa		-	-	-	-	**-**
15	Mandiri		-	-	-	-	**-**
4.1.3.	Penerimaan Pelayanan pasien tidak mampu	1,968,471,389	6,833,003,970	5,999,635,511	6,614,598,151	6,614,598,151	**6,945,328,058**
1	Dikes Kota	1,782,305,596	5,885,444,814	5,716,338,583	6,302,263,288	6,302,263,288	**6,617,376,452**
2	Dikes Lombok Timur	-	75,158,100	19,483,700	21,480,779	21,480,779	**22,554,818**
3	Dikes Lombok Barat	-	246,720,022	-			**0**
4	Dikes Lombok Utara	170,187,493	75,775,426	-			**0**
5	Dikes Lombok Tengah	15,978,300	11,820,900	73,696,598	81,250,499	81,250,499	**85,313,024**
6	BKSPJK	1,968,471,389	538,084,708	190,116,630	209,603,585	209,603,585	**220,083,764**
4.1.4.	Lain lain Pendapatan RSU yang syah	1,273,239,141	830,170,042	860,585,284	948,795,276	948,795,276	**996,235,039**
1	Penerimaan Jasa Giro	24,236,769	29,179,602	258,897,505	285,434,499	285,434,499	**299,706,224**
2	Pendidikan dan Diklat	817,461,000	318,600,000	373,765,000	412,075,913	412,075,913	**432,679,708**
3	Lain lain Pendapatan asli daerah yang sah	200,529,241	396,390,440	115,716,529	127,577,473	127,577,473	**133,956,347**
4	Taxi	40,750,000	9,000,000	9,000,000	9,922,500	9,922,500	**10,418,625**
5	Parkir	11,500,000	77,000,000	55,206,250	60,864,891	60,864,891	**63,908,135**
6	Sewa	178,762,131	-	48,000,000	52,920,000	52,920,000	**55,566,000**
II	**JUMLAH PENDAPATAN**	**112,513,270,790**	**135,019,465,939**	**154,689,299,278**	**170,544,952,454**	**170,544,952,454**	**179,072,200,077**

B. PROYEKSI NERACA

No	Komponen	Proyeksi Neraca					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. ASET							
A.	Aset Lancar						
1	Kas dan Bank	5.688.372.982	6.131.606.574	6.364.798.624	6.584.685.284	7.114.417.194	7.755.253.893
2	Piutang Layanan	5.000.000.000	10.051.453.063	12.564.316.328	15.705.395.411	19.631.744.263	24.539.680.329
3	Piutang Karyawan	84.195.046	92.614.551	101.034.055	109.453.560	117.873.064	126.292.569
4	Piutang Lain-lain	1.034.337.778	1.137.771.556	1.241.205.334	1.344.639.111	1.448.072.889	1.551.506.667
5	Persediaan	2.450.000.000	4.925.212.001	6.156.515.001	7.695.643.751	9.619.554.689	12.024.443.361
	Jumlah Aset Lancar	14.256.905.806	22.338.657.744	26.427.869.342	31.439.817.117	37.931.662.099	45.997.176.819
B.	**Aset Tetap**						
1	Tanah	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000
2	Peralatan dan Mesin	80.240.678.994	85.240.678.994	92.480.487.638	101.053.598.005	108.707.554.712	117.891.902.661
3	Gedung dan Bangunan	71.461.699.690	96.461.699.690	104.151.275.547	133.225.555.829	160.807.506.211	209.777.434.059
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.178.191.000	1.678.191.000	1.192.625.323	1.684.978.432	1.204.087.512	1.690.111.426
6	Aktiva tetap lainnya	242.145.000	242.499.365	242.800.759	243.082.077	243.320.630	243.530.241
7	Konstruksi dan Pengerjaan	849.921.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	165.462.636.044	195.113.069.049	209.557.189.267	247.697.214.343	282.452.469.066	341.092.978.386
C.	**Aset Lain-lain**						
	Aset tak terwujud	199.812.800	399.500.000	545.000.000	675.000.000	798.500.000	927.800.000
	Jumlah Aset lainnya	199.812.800	399.500.000	545.000.000	675.000.000	798.500.000	927.800.000
II. KEWAJIBAN							
A.	**Kewajiban Jangka Pendek**						
1	Hutang Perhitungan Pihak ke III	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
2	Uang muka dari kas daerah						
3	Pendapatan yang diterima di muka						
4	Hutang jangka pendek lainnya						
B	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**						
1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
2	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya						
3	Utang Dalam Negeri-Lembaga Keu Bank						
4	Utang Dalam Negeri- Lembaga Keu Bukan Bank						
5	Utang Dalam Negeri – Obligasi						
6	Utang jangka Panjang Lainya						
C.	**Kewajiban Jangka Panjang**						
	Jumlah Kewajiban	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
III. EKUITAS DANA							
	Ekuitas dana Lancar						
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	4.463.372.982	3.669.000.573	3.286.541.124	2.736.863.408	2.304.639.849	1.743.032.212
2	Cadangan Piutang	6.118.532.824	11.281.839.170	13.906.555.717	17.159.488.082	21.197.690.216	26.217.479.565
3	Cadangan persediaan	2.450.000.000	4.925.212.001	6.156.515.001	7.695.643.751	9.619.554.689	12.024.443.361
4	Dana yg hrs disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek						
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	13.031.905.806	19.876.051.744	23.349.611.842	27.591.995.241	33.121.884.754	39.984.955.139
	Ekuitas dan Investasi						
1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	165.462.636.044	195.113.069.049	209.557.189.267	247.697.214.343	282.452.469.066	341.092.978.386
2	Diinvestasikan Dalam Aset lainnya	199.812.800	399.500.000	545.000.000	675.000.000	798.500.000	927.800.000
	Jumlah Ekuitas Dan Investasi	**165.662.448.844**	**195.512.569.049**	**210.102.189.267**	**248.372.214.343**	**283.250.969.066**	**342.020.778.386**

C. PROYEKSI LAPORAN OPPERASIONAL

	PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL						
No.	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	PENDAPATAN	124.751.896.877,00	143.398.661.480,03	168.590.648.387,91	182.077.900.258,94	196.644.132.279,66	212.392.462.862,03
1	Pendapatan Jasa Layanan	105.971.465.877,00	119.232.372.463,03	128.770.962.260,07	139.072.639.240,88	150.198.450.380,15	162.214.326.410,56
2	Pendapatan APBD	18.780.431.000,00	24.104.789.017,00	39.319.686.127,84	42.465.261.018,06	45.862.481.899,51	49.531.480.451,47
3	Pendapatan APBN	-	-	-			
4	Pendapatan Usaha Lainnya/KSO	58.971.000,00	61.500.000,00	500.000.000,00	540.000.000,00	583.200.000,00	646.656.000,00
B	BIAYA	64.465.019.086,00	110.889.471.632,00	119.928.511.868,87	131.921.363.055,76	145.113.499.361,33	159.624.849.297,46
1	Biaya Pegawai	11.478.061.894,00	15.950.381.626,00	18.583.424.580,00	20.441.767.038,00	22.485.943.741,80	24.734.538.115,98
2	Biaya Barang dan jasa	52.986.957.192,00	94.939.090.006,00	101.345.087.288,87	111.479.596.017,76	122.627.555.619,53	134.890.311.181,48
C	Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/	60.286.877.791,00	32.509.189.848,03	48.662.136.519,04	50.156.537.203,19	51.530.632.918,33	52.767.613.564,57
	Kerugian						
	Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar		-	-			
	Rugi Penjualan Aset Non Lancar		-	-			
	Rugi Penurunan Nilai		-	-			
	Lain-lain		-	-			
D	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	60.286.877.791,00	32.509.189.848,03	48.662.136.519,04	50.156.537.203,19	51.530.632.918,33	52.767.613.564,57
	Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa		-				
	Biaya dan Kejadian Luar Biasa		-				
	Surplus/Defisit Tahun Berjalan	60.286.877.791,00	32.509.189.848,03	48.662.136.519,04	50.156.537.203,19	51.530.632.918,33	52.767.613.564,57

D. PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS

No	Komponen	PROYEKSI ARUS KAS					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasional							
1	Penerimaan dari layanan	30.000.000.000	60.308.718.376	75.385.897.970	94.232.372.463	117.790.465.579	147.238.081.973
2	Penerimaan Piutang/Tagihan	5.000.000.000	10.051.453.063	12.564.316.328	15.705.395.411	19.631.744.263	24.539.680.329
3	**Pengeluaran operasional**	**33.775.000.000**	**67.897.565.439**	**84.871.956.798**	**106.089.945.998**	**132.612.432.497**	**165.765.540.622**
	- Biaya Pegawai/Operasional APBD	-	-	-	-	-	-
	- Biaya bahan/barang/jasa	14.700.000.000	29.551.272.004	36.939.090.006	46.173.862.507	57.717.328.134	72.146.660.167
	- Pembayaran Utang Pihak III	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
	- Persediaan	2.450.000.000	4.925.212.001	6.156.515.001	7.695.643.751	9.619.554.689	12.024.443.361
	- Biaya Jasa Pelayanan	13.200.000.000	26.535.836.086	33.169.795.107	41.462.243.884	51.827.804.855	64.784.756.068
	- Utang Jasa Pelayanan	2.200.000.000	4.422.639.348	5.528.299.184	6.910.373.981	8.637.967.476	10.797.459.345
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi							
1	Hasil penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-
4	Perolehan Aset Tetap	47.298.575.529	28.737.363.166	41.819.766.282	38.806.421.196	44.344.403.113	45.732.953.370
5	Pembelian Investasi	-	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih yang diinginkan untuk Aktivitas Investasi	47.298.575.529	28.737.363.166	41.819.766.282	38.806.421.196	44.344.403.113	45.732.953.370
III. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan							
1	Tambahan Ekuitas	11.146.620.441	13.247.779.944,87	15.980.026.335,53	18.732.649.323,02	22.008.341.490,18	25.294.609.007,56
2	Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-	-
3	Penerimaan APBD	46.386.037.992	49.343.132.090	75.104.789.016,50	86.677.508.421,51	123.639.478.247,90	149.772.604.422,33
4	Penerimaan APBN	1.600.000.000	1.643.292.489,60	1.685.332.555,73	1.715.949.579,50	1.743.435.717,41	1.764.058.162,69
5	Perolehan Pinjaman	-	-				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	59.132.658.433	64.234.204.524	92.770.147.908	107.126.107.324	147.391.255.455	176.831.271.593
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	13.059.082.904	37.959.447.359	54.028.639.126	72.167.508.003	107.856.629.687	137.110.539.903
	KAS DAN SETARA KAS AWAL	4.463.372.982	11.301.984.047	26.404.127.233	34.586.089.535	37.363.759.138	35.578.995.262
	JUMLAH SALDO KAS	**17.522.455.886**	**49.261.431.405**	**80.432.766.359**	**106.753.597.538**	**145.220.388.825**	**172.689.535.165**

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN BERJALAN

BAB I
PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota *Nomor* 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 08/2006, PP No. 71/2010, dan Peraturan Walikota *Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota* Nomor *48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.* Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik dengan:

a) menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
b) menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam
c) rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

keuangan pemerintah, antara lain:

1) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama dan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 No.3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
12) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
13) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2014 tanggal 22 Desember Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2015 tanggal 19 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D);

16) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
17) Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram;
18) Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram;
19) Peraturan Walikota Mataram Nomor 13/2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan

2.1. Kebijakan keuangan

2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Entitas pelaporan keuangan SKPD

4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos Pendapatan

5.2. Penjelasan Pos Belanja

5.3. Penjelasan Pos Aset

5.4. Penjelasan Pos Kewajiban

5.5. Penjelasan Pos Ekuitas dana

5.6. Penjelasan Pos Pendapatan LO

5.7. Penjelasan Pos Beban LO

5.8. Penjelasan Pos surplus/defisit LO

5.9. Penjelasan Pos ekuitas awal

5.10. Penjelasan koreksi

5.11. Penjelasan ekuitas akhir

5.12.Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2016 disahkan melalui Perda Nomor : 10 Tahun 2015 , sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2016.

Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Kota Mataram, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran semula	Anggaran setelah Perubahan	%Kenaikan/ Penurunan
I	Pendapatan			
1	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-
2	Lain-Lain PAD	160.000.000.000	164.851.653.651	1,63
	Jumlah Pendapatan	160,000,000,000	164,851,653,651	1,63
II	Belanja			
1	Belanja Pegawai	20.178.338.632	22.445.698.632	9
2	Belanja Operasional	175.998.176.466	169.049.830.117	25
3	Belanja Modal	1.500.000.000	10.000.000.000	176
	Jumlah Belanja	197.676.515.098	197.676.515.098	
	Defisit/Surplus			

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kota Mataram dengan adanya perubahan APBD tahun 2016 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram antara lain:

1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi *leading sector* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Kota Mataram, telah melakukan kebijakan antara lain:
   a. Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
   b. Meningkatkan kemampuan tenaga medis dan menambah

tenaga dokter spesialis melalui pelatihan, kursus dan pemberian beasiswa;

c. Menambah pos-pos pendapatan atau fasilitas pelayanan.

2) Upaya penghematan belanja, dengan menempuh kebijakan antara lain:

a. Mengurangi belanja barang dan jasa;

b. Memanfaatkan SDM yang ada secara maksimal;

c. Menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal;

d. Memelihara peralatan dan perlengkapan kantor dan bekerja dengan penuh tangungjawab.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram antara lain:

a. Kesulitan dalam mengalokasikan dana karena banyak kegiatan yang di ajukan oleh masing-masing bagian dan bidang;

b. Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena masih kurangnya sarana pendukung.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator apencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006** pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram

1) *Non Program*

1. Belanja Tidak Langsung pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram terdiri dari beberapa belanja antara lain :

1	Gaji Pokok PNS	Rp. 11.764.243.377
2	Tunjangan Keluarga	Rp.999.028.996

3	Tunjangan Jabatan	Rp.244.230.000
4	Tunjangan Fungsional	Rp.1.032.150.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	Rp.184.590.000
6	Tunjangan Beras	Rp. 722.896.440
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 16.886.880
8	Pembulatan Gaji	Rp. 183.540
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp. 1.976.595.760
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi	Rp. 2.540.000.000,00
11	Tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp. 2.964.893.639
Jumlah		**Rp.22.445.698.632**

2) ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota***

Tujuan program ini meningkatkan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bersifat operasional Rumah sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan termasuk Anggaran BLUD dengan anggaran sebesar Rp 199.409.251.942,00.

3) ***Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat***

Tujuan program ini meningkatnya sarana dan Prasarana serta kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang di dukung 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.730.913.310,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran bulan Juni tahun 2021 dan perbandingan dengan realisasi bulan Juni tahun 2020

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2021	
			Tahun 2021	Tahun 2020	Anggaran	Thn 2020
A.	**PENDAPATAN**					
1	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
2	Lain Pedapatan Daerah yang syah	160.000.000.000,00	85.696.862.994,84	63.898.226.012,78	53,56	74,56
	Jumlah Pendapatan	**160.000.000.000,00**	**85.696.862.994,84**	**63.898.226.012,78**	**53,56**	**74,56**
B.	**BELANJA**					
1	Belanja Pegawai	27.589.504.896,00	10.558.147.299,00	10.458.407.735,00	38,27	99,06
2	Belanja Barang dan Jasa	150.379.082.080,00	93.791.666.768,77	71.617.968.825,80	62,37	76,36
3	Belanja Modal	64.700.914.000,00	12.451.752.061,00	7.574.793.629,05	19,25	60,83
	Jumlah Belanja	**242.669.500.976,00**	**116.801.566.128,77**	**89.651.170.189,85**	48,13	76,76
	Surplus/Defisit	(82.669.500.976,00)	(31.104.703.133,93)	(25.752.944.177,07)	-	-

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

a. Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan antara lain :
   1. Kelengkapan administrasi bagi pasien/masyarakat yang menggunakan BPJS;
   2. Pasien tidak dapat membayar biaya/klaim dari rumah sakit.

b. Kendala terkait dengan target efisiensi belanja antara lain disebabkan oleh :
   a. Tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan sehingga RSUD Kota Mataram harus terus meningkatkan fasilitas pelayanan;
   b. Belum maksimalnya pendayagunaan pegawai;
   c. Masih rendahnya tarif sehingga tidak dapat menutupi biaya

operasional RSUD Kota Mataram.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

a. Melakukan koordinasi dengan pelaksanaan program/kegiatan untuk menentukan skala prioritas terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang memang benar dibutuhkan untuk saat ini;
b. Memberikan fasilitas pengaduan terhadap pasien BPJS dan membantu pengurusan kartu BPJS;
c. Memaksimalkan pendayagunaan pegawai yang sudah memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga pelayanan terhadap tugas-tugas RSUD Kota Mataram dapat berjalan lancar.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya eknomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1b/PERT/2007 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram maka kebijakan akuntansi juga mengalami perubahan.

4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Asumsi kemandirian entitas

berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

- Asumsi kesinambungan entitas
  berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
- Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)
  berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
- Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**.Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP Berbasis akrual dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2016. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan antara lain:

a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA).
f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.
b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

b. Neraca

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat

sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

d) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi.Piutang retribusi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

e) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

f) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

g) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

h) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net*

realizable value). Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.

Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis piutang:

(1) Piutang Pajak

Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25%;
- 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%;
- Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

(2) Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%;

i) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang diperoleh dengan maksud

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Metode pencatatan persediaan selain obat-obatan dicatat menggunakan metode fisik/periodik sedangkan untuk persediaan obat-obatan dengan metode perpetual.

Pencatatan perpetual yaitu "pencatatan atas persediaan yang dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk maupun persdiaan yang keluar." Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan sebenarnya. Sedangkan metode pencatatan periodik adalah pencatatan atas persediaan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk dilakukan pembukuan.

2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b) Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva

yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung

(tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan

jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam

pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai penguramg nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan penyusutan.

5. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga(PFK), utang beban dan bagian lancar utang jangka panjang.

6. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.Suatu kewajiban tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek, jika:

a. Jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu perjanjian tentang pendanaan kembali (*refinancing*), atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan, dimana dalam laporan keuangan subtansi

kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

c. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan-LO antara lain:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu :
    - Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
c. Pencatatan pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-Lo bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
e. Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
f. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.
g. Pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode akuntansi dibukukan sebagi pengurang pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode sebelumnya dibukukan sebagi pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
h. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain : Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.
i. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.

2. Beban-LO

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan beban-LO yaitu:

a. Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.

b. Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
c. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
e. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan dalam beban operasional, beban transfer, defisit non operasional dan beban luar biasa. Berdasarkan jenisnya beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusustan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain.
f. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (*contra post*) beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
g. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos antara lain:

a. Ekuitas Awal
b. Surplus/defisit-LO
c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas Akhir

e. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan-LO antara lain:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu :
   - Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   - Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
c. Pencatatan pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-Lo bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
e. Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
f. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.
g. Pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non recurring) pada periode akuntansi dibukukan sebagi pengurang pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non recurring) pada periode sebelumnya dibukukan sebagi pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
h. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain : Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.
i. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.

2. Beban-LO

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan beban-LO yaitu:

h. Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.

i. Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
j. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
k. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
l. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan dalam beban Operasional, Beban transfer, defisit non operasional dan beban luar biasa. Berdasarkan jenisnya beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban penyususstan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain.
m. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (contra post) beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
n. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos : antara lain:

j. Ekuitas Awal
k. Surplus/defisit-LO
l. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang erasal dari dampak kumulatis yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntasi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
m. Ekuitas Akhir

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.165.850.000.000,00*, terealisasi sebesar *Rp 85.696.862.994,84* atau *51,67%.*

Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.*..... terealisasi sebesar *Rp.,00* atau ,00*%.* Rincian atas jumlah PAD tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1				
2				
3				
4				
Jumlah		-	-	-

2. Lain-lain Pendapatan yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp165.850.000.000,00*, terealisasi sebesar *Rp.85.696.862.994,84*atau*51,67%.* Rincian atas Lain-lain Pendapatan yang Sah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum RSUD	165.850.000.000,00	85.696.862.994,84	51,67
2	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	-	-
3				-
Jumlah		165.850.000.000,00	85.696.862.994,84	

1. Pendapatan Asli Daerah

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Pajak Daerah

Pajak daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.....,00*, realisasi penerimaan sebesar *Rp.....,00* atau .....%. Realisasi tersebut merupakan .....% dari realisasi PAD secara keseluruhan.

Rincian atas penerimaan pajak daerah tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				-
Jumlah		-	-	

Realisasi Pajak Daerah di atas/bawah anggaran dapat dijelaskan antara lain:

- .....
- .....
- dst

1.2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.....,00,* realisasi penerimaan sebesar *Rp.....,00* atau .....*%.* Realisasi tersebut merupakan .....% dari realisasi PAD secara keseluruhan. Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Jumlah		-	-	

Realisasi retribusi daerah di atas/bawah anggaran terutama disebabkan:

- .....
- .....
- dst.

1.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.....,00,*realisasi penerimaan sebesar *Rp.....,00* atau .....*%.* Realisasi tersebut merupakan .....% dari realisasi PAD secara keseluruhan. Rincian atas penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1				
2				
Jumlah		-	-	

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di atas/bawah anggaran disebabkan:

- .....
- .....
- dst.

1.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.165.850.000.000,00*, realisasi penerimaan sebesar *Rp.85.696.862.994,84*atau*51,67%.* Realisasi tersebut merupakan % dari realisasi PAD secara keseluruhan.

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah	165.850.000.000,00	85.696.862.994,84	51,67
2				
3				
5				
Jumlah		165.850.000.000,00	85.696.862.994,84	51,67

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di atas anggaran disebabkan:

- Semakin meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Daerah Kota Mataram.
- Bertambah pos pendapatan/ fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah Kota Mataram.
- Bertambahnya jumlah dokter spesialis Rumah Sakit Daerah Kota Mataram

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil -

Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp 242.669.500.976,00* realisasinya sebesar *Rp* 116.801.566.128,77 *atau* 48,13*%.* Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	27.589.504.896,00	10.558.147.299,00	38,27
2	Belanja Barang	150.379.082.080,00	93.791.666.768,77	62,37
3	Belanja Modal	64.700.914.000,00	12.451.752.061,00	19,25
Jumlah		242.669.500.976,00	116.801.566.128,77	48,13

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp*177.968.586.976,00 terealisasi sebesar *Rp*104.349.814.067,77atau 58,63*%.* Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	27.589.504.896,00	10.558.147.299,00	38,27
2	Belanja Barang	150.379.082.080,00	93.791.666.768,77	62,37
Jumlah		177.968.586.976,00	104.349.814.067,77	58,63

2. **Belanja Modal**, target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp 64.700.914.000,00* terealisasi sebesar *Rp 12.451.752.061,00*atau 19,25*%.* Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	52,577,314,000.00	10,790,857,745.00	20.52
3	Belanja Gedung dan Bangunan	10,933,100,000.00	1,610,134,316.00	14.73
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,190,500,000.00	50,760,000.00	4.26
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	64,700,914,000.00	12,451,752,061.00	19.25

NERACA KOMPARATIF per 30 Juni 2021 dan 2020

5.1.4. ASET

U r a i a n		Tahun 2021	Tahun 2020
ASET LANCAR			
1.	**Kas**	**10.661.509.140,38**	**2.428.459.197,57**
	Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaransebesar Rp 10.661.509.140,38 dan Rp 2.428.459.197,57 merupakan saldo kas per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dengan rincian:		
	a. Kas di Bank	2.412.686.684,38	1.543.459.197,57
	b. Kas di Bend. Pengeluaran BLUD	0	0
	c. Kas di Bend. Pengeluaran APBD		
		473.000.000,00	885.000.000,00
	d. Kas di Bend. Penerimaan	0	0
	e. Kas Lainnya	7.775.822.456,00	0

	Jumlah	**10.661.509.140,38**	**2.428.459.197,57**
2.	**Kas di Bank**	**2.412.686.684,38**	**1.543.459.197,57**
	Saldo Kas di Bank dengan rincian:		
	a. Bank Tabungan Negara	13.501.823,64	13.818.976,55
	b. Bank Rakyat Indonesia	360.819.899,00	210.977.173,00
	c. Bank Negara Indonesia	1.729.683.141,00	646.345.507,00
	d. Bank NTB	45.544.460,00	108.047.187,00
	a. Bank Mandiri	36.111.740,82	132.797.281,59
	b. Bank Mandiri	70.505.421,35	150.000.990,76
	g. Bank BNI Syariah	57.202.876,00	130.257.129,00
	h.Bank Bni Syariah TabunganBisnis	0	0
	i. CIMB		
		99.317.322,57	151.214.952,82

	Jumlah	**2.412.686.684,38**	**1.543.459.197,57**
3.	**Kas di Bendaharawan Pengeluaran**	**0**	**0**
	Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran BLUD sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan saldo kas per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dengan rincian:		
	a. Sisa UUDP	0	0
	b. Jasa bank belum di setor ke kasda	.....,00	.....,00
	c. Uang PFK yang belum disetor	.....,00	.....,00
	Jumlah	**0**	**0**
4.	**Kas di Bendaharawan Penerimaan**	**0**	**0**
	Saldo Kas di Bendaharawan Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00 per30 Juni 2021 dan 2020, atas uang penerimaan dari wajib pajak/wajib restibusi yang belum disetor ke kasda		
5.	**Piutang**	**.....,00**	**.....,00**

	Saldo Piutang Pajak sebesar Rp.....dan Rp..... merupakan saldo per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Pasien BPJS		
	b. Pasien Umum		
	Jumlah	**.....,00**	**.....,00**
	Daftar rincian disajikan pada lampiran...		
6.	**Piutang lain-lain**	**36.912.956.590,75**	**39.330.413.960,00**
	Saldo Piutang Restribusi sebesar Rp 36.912.956.590,75 dan Rp 39.330.413.960,00 merupakan saldo per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Pasien Askes	.....,00	.....,00
	b. Pasien BPJS	**25.105.299.613,00**	**35.538.764.210,00**
	c. Pasien Umum	**4.178.332.937,75**	**3.596.959.231,00**
	c. Parkir	**53.000.000,00**	**18.000.000,00**
	c. Lain-lain	**7.576.324.040,00**	**176.690.519,00**

	Jumlah	**36.912.956.590,75**	**39.330.413.960,00**
	Daftar rincian disajikan pada lampiran...		
7.	**Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**	**.....,00**	**.....,00**
	Saldo Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp..... dan Rp..... merupakan saldo per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang berasal dari temuan kerugian kas daerah hasil audit dari aparat pengawasan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Temuan BPK	.....,00	.....,00
	b. Temuan BPKP	.....,00	.....,00
	c. Temuan dari Itjen Depdagri	.....,00	.....,00
	d. Temuan dari Bawasda Provinsi	.....,00	.....,00
	e. Temuan dari Bawasda Kabupaten	.....,00	.....,00

	Jumlah	**.....,00**	**.....,00**
	Daftar rincian disajikan pada lampiran...		
6.	**Persediaan**	**3.985.452.837,00**	**3.137.622.611,00**
	Saldo Persediaan sebesar Rp 3.985.452.837,00 dan Rp 3.137.622.611,00 merupakan saldo per tanggal 30Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Obat-obatan	2.894.836.021,00	1.916.069.649,00
	b. BHP Medis	1.011.977.778,00	979.378.128,00
	c. Barang Cetakan /Kuasi	35.263.150,00	143.292.600,00
	d. Bahan Makanan dan Minuman	35.303.388,00	76.617.234,00
	e. Alat Tulis Kantor	542.500,00	.....,00
	f. BHP Radiologi	.....,00	.....,00
	g. BHP Laboratorium	.....,00	.....,00
	h. BHP IKL	.....,00	.....,00
	i. BHP Alat Rumah Tangga	7.530.000,00	22.265.000,00
	Jumlah	**3.985.452.837,00**	**3.137.622.611,00**
ASET TETAP			
7.	**Tanah**	**18.229.924.801,00**	**11.490.000.000,00**
	Saldo Aset Tetap - Tanah sebesar Rp 18.229.924.801,00 dan Rp 11.490.000.000,00 merupakan saldo per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		

	a. Tanah untuk bangunan kantor	.....,00	.....,00
	b. Tanah untuk kebun	.....,00	.....,00
	c. Tanah untuk fasilitas umum	18.229.924.801,00	11.490.000.000,00
	Jumlah	**18.229.924.801,00**	**11.490.000.000,00**
	Adapun mutasi aset tetap – tanah selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:		
	Mutasi – Tambah:		
	a. Tanah untuk bangunan kantor	.....,00	.....,00
	b. Tanah untuk kebun	.....,00	.....,00
	c. Tanah untuk fasilitas umum	.....,00	.....,00
	Jumlah Penambahan	**.....,00**	**.....,00**
	Mutasi – Kurang:		
	a. Tanah untuk bangunan kantor	.....,00	.....,00
	b. Tanah untuk kebun	.....,00	.....,00
	c. Tanah untuk fasilitas umum	.....,00	.....,00
	d. dst	.....,00	.....,00
	Jumlah Pengurangan	**.....,00**	**.....,00**
	Jumlah	**.....,00**	**.....,00**

Catatan atas akun aset tetap – tanah adalah sebagai berikut:			
	➢		
	➢ .....dst		
	Daftar rincian aset tetap – tanah disajikan pada lampiran:.....		
8.	**Peralatan dan Mesin**	**300.112.722.188,86**	**258.553.341.488,40**
	Saldo Aset tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp 300.112.722.188,86dan Rp 258.553.341.488,40 merupakan saldo per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Alat-alat bantu	3.254.527.776,00	1.955.847.500,00
	b. Alat Angkutan/Transportasi	3.238.359.548,59	3.238.359.548,59
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	364.664.320,00	364.664.320,00
	d. Alat Pemeliharaan Tanaman	213.045.500,00	12.000.000,00
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.249.497.149,18	28.005.595.462,56
	f. Alat Studio dan Komunikasi	1.461.880.328,00	1.339.621.178,00
	g. Alat Kedokteran	198.207.049.260,10	156.973.602.399,26
	h. Alat Kesehatan	56.805.069.006,99	62.495.147.406,99
	i. Lainnya	2.318.629.300,00	1.995.779.500,00

	Jumlah	**300.112.722.188,86**	**258.553.341.488,40**
9.	**Bangunan Gedung**	**160.628.828.911,32**	**129.970.263.251,00**
	Saldo Aset Tetap – Bangunan Gedung sebesar Rp 160.628.828.911,32dan Rp 129.970.263.251,00merupakan saldo per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Gedung Kantor	66.667.343.765,21	63.120.598.718,96
	b. Gedung Gudang	1.375.704.250,00	1.375.704.250,00
	c. Gedung Instalasi	331.642.150,00	331.642.150,00
	d. Gedung Kesehatan	80.934.612.843,00	63.682.397.382,04
	e. Gedung Garasi	315.400.000,00	315.400.000,00
	f. Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.893.475.903,11	1.033.870.750,00
	g. Gedung Tempat Ibadah	110.650.000,00	110.650.000,00
	Jumlah	**160.628.828.911,32**	**129.970.263.251,00**
10.	**Jalan, Jaringan, dan Instalasi**	**10.860.968.851,00**	**10.017.304.351,00**

	Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 10.860.968.851,00dan Rp 10.017.304.351,00merupakan saldo per tanggal 30Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Bangunan Air Bersih	148.950.000,00	148.950.000,00
	b. Bangunan Air Kotor	50.760.000,00	0
	c. Instalasi Air Minum/Air Bersih	873.199.750,00	873.199.750,00
	d. Instalasi Air Kotor	1.582.218.298,00	1.582.218.298,00
	e. Instalasi Gardu Listrik	227.383.000,00	227.383.000,00
	f. Instalasi Gas	1.091.196.500,00	0
	g. Jaringan Telepon	379.840.500,00	184.653.000,00

	h. Jaringan Gas	416.649.500,00	1.312.434.000,00
	i. Jaringan Pembawa (Air Minum)	1.805.591.621,00	1.403.286.621,00
	j. Jaringan Listrik	4.285.179.682,00	4.285.179.682,00
	Jumlah	**10.860.968.851,00**	**10.017.304.351,00**
11.	**Aset Tetap Lainnya**	**29.099.073.316,03**	**1.034.474.946,05**
	Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 29.099.073.316,03 dan Rp 1.034.474.946,05 merupakan saldo per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Buku dan Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	192.000.000,00	192.000.000,00
	c. Aset Tetap Renovasi	0	792.474.946,05
	d. Aset Lain	28.857.073.316,03	
	Jumlah	**29.099.073.316,03**	**1.034.474.946,05**
	Adapun mutasi aset tetap – Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:		

	Mutasi – Tambah:		
	a. Buku dan Perpustakaan	.....,00	.....,00
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	.....,00	.....,00
	c. Hewan dan Tanaman	.....,00	.....,00
	Jumlah Penambahan	**.....,00**	**.....,00**
	Mutasi – Kurang:		
	a. Buku dan Perpustakaan	.....,00	.....,00
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	.....,00	.....,00
	c. Hewan dan Tanaman	.....,00	.....,00
	Jumlah Pengurangan	**.....,00**	**.....,00**
	Jumlah	**.....,00**	**.....,00**
Catatan atas akun aset tetap – Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:			
	➢		
	➢		
	➢ dst		
	Daftar rincian aset tetap – Aset Tetap Lainnya beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....		

12.	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**0**	**17.646.014.600,00**
	Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 30Juni 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan 17.646.014.600,00 merupakan aset tetap yang dalam proses pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Perencanaan IPAL	.....,00	.....,00
	b. Perencaan Rawat Inap	.....,00	.....,00
	c. Perencanaan Poli RS	.....,00	.....,00
	d. Gedung Poli	.....,00	.....,00
	Jumlah	**0**	**17.646.014.600,00**
Catatan atas akun aset tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:			
	➢		
	➢		
	Daftar rincian aset tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran:.....		
ASET LAINNYA			
14.	**Aset tidak Berwujud**	**3.126.302.000,00**	**943.105.800,00**

	Saldo Aset tidak berwujud merupakan Aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, software dan goodwill serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebesar Rp 3.126.302.000,00 dan Rp 943.105.800,00 merupakan saldo per tanggal 30Juni 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Software Billing System	199.812.800,00	199.812.800,00
	b. Software Rekam Medis	199.903.000,00	199.903.000,00
	c. Software Remunerasi	50.000.000,00	50.000.000,00
	d. Website RSUD Kota Mataram	40.000.000,00	40.000.000,00
	e. Software RSUD Kota Mataram	74.480.000,00	74.480.000,00
	f. Sistem Bridging SIMRS & BPJS	199.910.000,00	199.910.000,00
	g. Aplikasi Daloket	124.000.000,00	124.000.000,00
	h. Aplikasi Android PSC 119	38.000.000,00	38.000.000,00
	i. Webservice & core system PSC 119	17.000.000,00	17.000.000,00
	j. User license aplikasi server		
	k. Set up server web database server	19.250.000,00	0
	l. Software SIMRS	53.350.000,00	0
		2.110.596.200,00	0
	Jumlah	**3.126.302.000,00**	**943.105.800,00**

5.1.5. KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
15.	**Uang Muka dari BUD**	**……,00**	**……,00**
	Saldo Uang Muka dari BUD sebesar Rp……,00 dan Rp……,00. per tanggal 30Juni 2021 dan 2020, merupakan kewajiban Bendaharawan Pengeluaran menyetorkan sisa UYHD ke kas daerah.		
Catatan atas akun ini adalah sebagai berikut:			
	➢ ……		
	➢ ……		
	➢ ……dst		
16.	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga**	**……,00**	**……,00**
	Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 30Juni 2021 dan 2020 sebesar Rp…… dan Rp……, merupakan kewajiban Bendaharawan Pengeluaran untuk menyetorkan kepada pihak ketiga atas pemungutan pajak/non pajak.		
Adapun jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan adalah sebagai berikut:			
	➢ ……		
	➢ ……		
	➢ ……dst		

17.	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	14.243.374.057,00	29.752.871.273,00
	Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)bulan setelah tanggal pelaporan.sebesar Rp 14.243.374.057,00 dan Rp 29.752.871.273,00 merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk membayara kepada fihak ketiga. Daftar Kewajiban jangka pendek terlampir.		
17.	Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	66.666.666,67	40.000.000,00

	Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajibanjangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas)bulan setelah tanggal pelaporan.sebesar Rp 66.666.666,67 dan Rp 40.000.000,00 merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk membayara kepada fihak ketiga. Daftar Kewajiban jangka pendek terlampir.		
5.1.6. EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
18.	**Cadangan Piutang**	**23.393.987.698,06**	**30.252.697.562,25**

	Saldo Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang per tanggal 30Juni 2021 dan 2020 sebesar Rp 23.393.987.698,06 dan Rp30.252.697.562,25 , merupakan pos lawan dari adanya pengakuan aset lancar – piutang, berupa:		
	a. Piutang Pajak	.....,00	.....,00
	b. Piutang Restribusi	.....,00	.....,00
	c. Piutang Pendapatan		
	Jumlah		
19.	**Cadanga Persediaan**	**3.985.452.837,00**	**3.137.622.611,00**
	Saldo Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Persediaan per tanggal 30 Juni 2021dan 2020 sebesar Rp 3.985.452.837,00dan Rp 3.137.622.611,00, merupakan pos lawan dari adanya pengakuan aset lancar – Persediaan.		
EKUITAS DANA INVESTASI			
20.	**Ekuitas Dana Investasi**	**346.924.651.700,15**	**287.586.830.250,31**
	Saldo Ekuitas Dana Investasi per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 sebesar Rp 346.924.651.700,15 dan Rp 287.586.830.250,31 yang terdiri dari:		

	a. Diinvestasikan dalam Hutang jangka panjang	-66.666.666,67	-40.000.000,00
	b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	315.493.118.557,79	282.662.332.450,87
	c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	31.498.199.809,03	4.964.497.799,44
	Jumlah	**346.924.651.700,15**	**287.586.830.250,31**

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.1.6 PENDAPATAN LO

Jumlah Pendapatan LO bulan Juni Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Tahun 2020 terjadi kenaikan/penurunan sebesar (Rp 1.697.884.226,06) atau (2,54%) dari tahun sebelumnya. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan - LO	68,615,658,607.84	66,917,774,381.78	1,697,884,226.06	2.54
2					
3					
Jumlah		68,615,658,607.84	66,917,774,381.78	1,697,884,226.06	2.54

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah LO**, Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO bulan Juni Tahun 2021 sebesar *Rp 0,00* naik/turun sebesar (0 %) dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar *Rp*

*66.917.774.381,78.*Rincian atas jumlah PAD-LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah LO	68,615,658,607.84	66,917,774,381.78	1,697,884,226.06	2.54
2					
3					
Jumlah		68,615,658,607.84	66,917,774,381.78	1,697,884,226.06	2.54

b. **Pendapatan Transfer LO**, Saldo pendapatan transfer LO Tahun 2021 sebesar *Rp.....,00*, naik/turun sebesar *Rp.....* atau .....% dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp.... Rincian atas pendapatan transfer LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1					
2					
3					
Jumlah		-			

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO,** Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2021 sebesar Rp.... mengalami kanikan/penurunan sebesar Rp... atau ...% dibanding Tahun 2020 sebesar Rp..... Rincian atas Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1					
2					
3					
Jumlah		-			

d. **Surplus non Operasional LO**, Jumlah Surplus non Operasional LO Tahun 2021 sebesar *Rp.....,00*, naik/turun sebesar *Rp.....* atau .....% dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp.... Rincian atas Surplus non Operasional LO tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1					
2					
3					
	Jumlah	-			

e. **Pendapatan Luar Biasa LO**, Jumlah Pendapatan Luar Biasa LO Tahun 2021 sebesar *Rp.....,00*, naik/turun sebesar *Rp.....* atau .....% dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp.... Rincian atas Pendapatan Luar Biasa LO tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1					
2					
3					
	Jumlah	-			

5.1.7 BEBAN LO

Beban LO dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Beban Operasi, Beban Transfer LO , Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa.

f. **Beban Operasi.**

Jumlah Beban Operasi LO bulan Juni tahun 2021 sebesar *Rp 48.007.588.025,77* naik/turun sebesar (*Rp 28.541.175.081,03)* atau (37,28%) dibandingkan saldo tahun 2019 sebesar Rp*76.548.763.106,80*. Rincian atas Beban Operasi LO tersebut sebagai berikut:

IAK DAERAH

Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
Beban Pegawai - LO	10,823,575,714.00	9,124,269,854.00	1,699,305,860.00	18.62
Beban Barang dan Jasa	37,184,012,311.77	67,424,493,252.80	(30,240,480,941.03)	(44.85)
Beban Penyusutan & Amortisasi	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-

Beban Transfer LO, Jumlah Beban Transfer LO Tahun 2021 sebesar

Rp.....,00, naik/turun sebesar *Rp.....* atau .....% dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp.... Rincian atas Beban Transfer LO tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1					
2					
3					
Jumlah		-			

g. **Defisit Non Operasional**, Jumlah Defisit Non Operasional Tahun 2021 sebesar *Rp.....,00*, naik/turun sebesar *Rp.....* atau .....% dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp.... Rincian atas Defisit Non Operasional tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1					
2					
3					
Jumlah		-			

h. **Beban luar Biasa**, Jumlah Beban luar Biasa Tahun 2021 sebesar *Rp.....,00*, naik/turun sebesar *Rp.....* atau .....% dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp.... Rincian atas Beban luar Biasa tersebut sebagai berikut :

dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	kenaikan/ penurunan	%
1					
2					
3					
Jumlah		-			

5.1.6 SURPLUS DEFISIT- LO

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat surplus/defisit LO sebesarRp 20.608.070.582,07 dibandingkan Tahun 2019 (Rp 9.630.988.725,02) terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp 30.239.059.307,09 atau (313,98%) dari tahun sebelumnya.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.1.7 PERUBAHAN EKUITAS

Pada bulan Juni tahun Anggaran 2021 terdapat ekuitas awal sebesar Rp 324.423.511.452,90 kemudian surplus defisit-Lo sebesar Rp 20.608.070.582,07 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ berupa koreksi atas nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp 599.030.647,38), dan kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp 24.432.972.516,00. Sehingga ekuitas akhir pada bulan Juni Tahun 2021 menjadi sebesar Rp 368.865.523.903,59. Rincian atas perubahan ekuitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

1	EKUITAS AWAL	324.423.511.452,90	281.277.589.769,10	43.145.921.683,80	15,34
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	20.608.070.582,07	(9.630.988.725,02)	30.239.059.307,09	(313,98)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:				
	Koreksi Nilai Persediaan				
	Selisih Revaluasi Aset Tetap				
	Koreksi ekuitas lainnya	(599.030.647,38)	-	(599.030.647,38)	#DIV/0!
	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	24.432.972.516,00	21.146.000.185,05		
4	EKUITAS AKHIR	368.865.523.903,59	292.792.601.229,13	76.072.922.674,46	25,98

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. Informasi Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram sejak mulai beroperasi pada tahun 2010 dipimpin oleh Direktur sesuai dengan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

Besarnya dukungan Pemerintah Kota Mataram baik dari segi financial dan non financial terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram berdampak terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan yang terus meningkat, jenis pelayanan yang terus bertambah dan jumlah pendapatan yang terus meningkat dari tahun ketahun.

Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram naik kelas menjadi kelas B, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram ini terdiri dari direktur, dua wadir yaitu Wadir Umum dan Keuangan dan Wadir Pelayanan dengan struktur organisasi.

Untuk pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram ini telah didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

VISI

“Rumah Sakit Unggulan Yang Ramah dan Profesional “

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, profesional dan bermutu tinggi bagi masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya;

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan RSUD Kota Mataram.

Struktur Organisasi :

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Dalam operasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram memiliki kegiatan dan layanan produk berupa:

n. Layanan Rawat Jalan Pagi dan Sore:
- Poli Gigi
- Poli Anak
- Poli Penyakit Dalam
- Poli Mata
- Poli Kandungan dan Kebidanan
- Poli Syaraf
- Poli Bedah
- Poli Fisioterpi
- Poli Kosmetik dan Kulit
- Poli Umum
- Poli Ortopedi
- Poli THT

o. Layanan Rawat Inap:
- Kelas VVIP dan VIP
- Kelas I, II dan III

p. Pelayanan penunjang dan lainnya
- Pelayanan IGD 24 jam Terintegrasi dan Mataram Emergency Medical Service (MEMS)
- Pelayanan Rawat Inap Kls I, II, dan III
- Pelayanan Rawat Inap Kls VIP A,VIP B dan VIP Nifas
- Pelayanan Rawat Jalan pagi-sore dan Eksekutif

- Pelayanan Kamar Operasi
- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Laboratorium
- Farmasi / Apotek 24 jam
- Pelayanan ICU/ICCU/Pelayanan Jantung Terpadu
- Pelayanan NICU/PICU
- Pelayanan Ruang Bersalin dan Nifas
- Pelayanan Hemodialisa
- Pelayanan MRI Dan CT Scan
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan Ambulans/Jenazah
- HCU (High Care Unit)/Stoke Center
- Pelayanan Farmasi/Antar Obat Gratis
- Pelayaan Bank Darah
- Pelayanan CSSD
- Pelayanan Terapi Hiperbaric Chamber
- Pelayanan Cathlab/Pelayanan Jantung Terpadu
- Pelayanan Insiminasi Bayi Tabung (Intrauterine Insemination)
- Rumah Duka/Kamar Jenazah
- Pelayanan Diklat/Pendidikan.
- Pelayanan home Care
- Pelayanan Artis Cantik (Antar Obat Gratis cepat akurat dan Simpatik)
- Pelayanan Permaisuri Dancing (Persalinan Aman Bayi Sehat Ibu Berseri dengan ANC rutin USG)

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kota Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram.

BAB V
PENUTUP

I. KESIMPULAN

RSUD Kota Mataram secara garis besar telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan baik, berdasarkan analisa dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan terus meningkat. Dengan pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan diharapkan dapat meraih peluang sekaligus masuk dalam penetra

Kemampuan pembiayaan dari tahun ke tahun semakin baik hal ini dapat dilihat dari kemampuan membiayai operasionalnya, sedangkan subsidi diharapkan dapat digunakan untuk investasi dalam upaya mengembangkan kemampuan dan jenis pelayanan.

Mengingat teknologi kedokteran berkembang begitu cepat dan berteknologi canggih maka bantuan dan subsidi pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota masih dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. SARAN

Agar dalam pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2022 berjalan dengan baik dibutuhkan perbaikan manajemen, baik dalam tatakelola keuangan, manajemen pengadaan serta manajemen pemeliharaan sehingga akan dicapai pengelolaan keuangan BLUD yang transparan , akuntabel dan efisiensi untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit.